



ANALISIS DETERMINASI KEMISKINAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh :

ARIEF NOVIYANTO LOT GAYO

NIM 130810101160

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018



ANALISI DETERMINASI KEMISKINAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

ARIEF NOVIYANTO LOT GAYO

NIM 130810101160

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan pujisyukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Alm Sarida nova dan Ibu Ariyani yang selalu memberikan kasih sayang, doa yang tak pernah henti, dan semangat yang membuat saya menjadi seperti ini.
2. Adik saya, Alfian Hidayattullah Lot Gayo yang memberikan dukungan baik secara langsung dan tidak langsung.
3. Guru / Dosen saya sejak taman kanak-kanak hingga saat ini saya di perguruan tinggi yang telah memberikan banyak motivasi dan ilmu yang tak henti – henti.
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Motto

“Man Jadda Wa Jadda”

Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arief Noviyanto Lot Gayo

Nim : 130810101160

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Determinasi Kemiskinan Di Indonesia” adalah benar benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah di ajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas ke absahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 April 2017

Yang menyatakan,

Arief Noviyanto Lot Gayo

NIM. 130810101160

SKRIPSI

ANALISIS DETERMINASI KEMISKINAN DI INDONESIA

Oleh :

Arief Noviyanto Lot Gayo

NIM 130810101160

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Siti Komariyah, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Lilis Yuliati, M.Si.

TANDA PERESETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia
Nama : Arief Noviyanto Lot Gayo
Nim : 130810101160
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Tanggal Persetujuan : 12 Desember 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Siti Komariyah, M. Si

NIP. 197106102001122002

Dr. Lilis Yuliati, M.Si

NIP. 196907181995122001

Mengetahui
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes

NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

ANALISI DETERMINASI KEMISKINAN DI INDONESIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Arief Noviyanto Lot Gayo

Nim : 130810101160

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

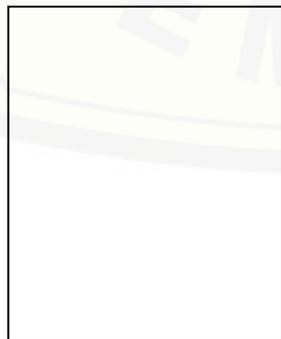
Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal :

28 Desember 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs. Petrus Edi Suswandi (.....)
2. Sekretaris : Fajar Wahyu Prianto, SE, M.E (.....)
3. Anggota : Dr. Zainuri, M.Si (.....)



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. M. Miqdad, SE, MM, Ak, CA.

NIP. 197107271995121001

Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia

ARIEF NOVIYANTO LOT GAYO

**Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, Universitas Jember**

ABSTRAK

Tujuan utama kebijakan ekonomi pembangunan adalah untuk menanggulangi kemiskinan, pemeratakan distribusi pendapatan, memiliki produk domestik bruto yang tinggi, dan pertumbuhan yang cepat. Hasil regresi data panel tahun 2012 – 2016 dengan menggunakan *evIEWS9* menunjukkan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pendidikan, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Secara individu variabel pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pendidikan, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil dengan uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model ini terbebas dari masalah asumsi klasik. Kesimpulan penelitian ini adalah pemilihan variabel independent mampu menjelaskan paket kebijakan - kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Kata kunci :kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pendidikan, dan pengeluaran pemerintah.

Analysis of Determination of Poverty in Indonesia

ARIEF NOVIYANTO LOT GAYO

**Department of Economics and Development Study, Faculty of Economics
and Business, University of Jember**

ABSTRACT

The main objectives of development economic policies are to reduce poverty, equalize income distribution, have high gross domestic product, and rapid growth. The panel data regression results for 2012-2016 using eviews9 show that simultaneously economic growth, income distribution, education, and government expenditure variables significantly influence poverty in Indonesia. Individually the variables of economic growth, income distribution, education, and government expenditure have a significant effect on poverty in Indonesia. The results of the classic assumption test show that this model is free from the problem of classical assumptions. The conclusion of this study is the selection of independent variables able to explain the package of government policies in alleviating poverty.

Keywords: poverty, economic growth, income distribution, education, and government expenditure.

RINGKASAN

Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia: Arief Noviyanto Lot Gayo,130810101160:2018: Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Tujuan utama kebijakan pembangunan ekonomi di banyak negara adalah menanggulangi kemiskinan, distribusi pendapatan dan juga memerlukan GNP yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat. Dalam melakukan pembangunan ekonomi maka diperlukan kebijakan alternatif yang dapat menekan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan yang sangat lebar dinegara berkembang Kemiskinan merupakan salah satu inti permasalahan dari pembangunan. Kemiskinan memiliki dampak yang ditimbulkan masalah sosial seperti kebodohan, pengangguran, perselisihan, kurangnya higienitas, kematian ibu dan anak, putus sekolah, tingkat kriminalitas. Kemiskinan merupakan suatu dinamika masalah sosial ekonomi yang digambarkan oleh terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap persentase kemiskinan di Indonesia. (2) Bagaimana pengaruh distribusi pendapatan terhadap persentase kemiskinan di Indonesia. (3) Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap persentase kemiskinan di Indonesia. (4) Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap persentase kemiskinan di Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini menggunakan 33 Provinsi di Indonesia dengan waktu penelitian tahun 2012 – 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan data sekunder yang terdiri dari variabel Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi dengan data panel menggunakan *evIEWS9*.

Dalam penelitian ini untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia, peneliti menggunakan tiga variabel bebas yaitu : Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah. Dari hasil regresi, secara

simultan variabel pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Secara simultan variabel Pendidikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil dengan uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model ini terbebas dari masalah multikolinieritas dan heterokedastisitas, tetapi dalam uji normalitas model ini memiliki model yang tidak berdistribusi normal.

Dalam penelitian ini, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah dengan cara memaksimalkan perekonomian rumah tangga di setiap daerah. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan menciptakan satu rumah tangga memiliki satu usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Pemerintah dapat membantu masyarakat dengan memberikan pelatihan agar dapat menciptakan lapangan usahanya sehingga rumah tangga tersebut dapat menambah penghasilan bagi dirinya dan sekitarnya.

Untuk pemerataan distribusi pendapatan di berbagai daerah sebaiknya dilakukan dengan pemerataan kebutuhan pokok di setiap daerah. Dengan pemerataan kebutuhan pokok di setiap daerah diharapkan tidak terjadinya kembali ketimpangan pendapatan di daerah. Mempermudah mobilitas atau akses menuju daerah tersebut juga sangat diperlukan guna menekan angka kemiskinan di daerah – daerah yang masih terpencil. Memperluas akses darat dan laut sangat diperlukan untuk menuju ke daerah – daerah terpencil.

Pendidikan merupakan salah satu variabel yang dapat menekan angka kemiskinan di suatu negara. Berkembangnya pendidikan diharapkan dapat mengubah mengubah pendapatan seseorang. Memberikan fasilitas pendidikan dengan mengirimkan berbagai tenaga kerja yang terpusat ke tempat terpencil guna pemerataan pendidikan di setiap daerah. Berkeja sama dengan investor – investor juga dapat membantu mendirikan – mendirikan sekolah di pelosok – pelosok. Selain pendidikan juga disertai memberikan lapangan pekerjaan yang luas juga dibutuhkan dalam pengentasan kemiskinan. Hal lain yang dapat dilakukan juga dengan cara mengirim beberapa anak yang di pedalaman

dengan memberi pendidikan fasilitas gratis pendidikan di wilayah yang lebih maju.

Untuk Pengeluaran Pemerintah yang semakin meningkat diharapkan dapat mengurangi permasalahan kemiskinan yang ada. Harapannya pengeluaran tersebut dapat digunakan secara tepat sasaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan memberikan anggaran yang lebih besar di daerah – daerah terpencil tidak hanya di daerah besar saja. Hal yang dapat diwujudkan dalam zaman saat ini yaitu dengan membuat anggaran pemerintah berdasarkan potensi daerah yang dapat dimaksimalkan. Dengan peninjauan dan lebih selektif dalam mengeluarkan dana anggaran sangat perlu dilakukan.

Kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari masalah ketimpangan distribusi pendapatan. Berdasarkan karakteristik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi yang tidak seragam. Dengan tidak seragamnya pembangunan ekonomi berdampak pada berkembangnya suatu wilayah untuk tumbuh. Seberapa cepatnya suatu wilayah dalam berkembang berpengaruh pada ketimpangan pembangunan dan pendapatan suatu daerah dengan daerah lain. Oleh karena itu pembangunan tidak hanya difokuskan di pulau jawa saja, melainkan pulau – pulau luar jawa yang belum dapat dijangkau agar dapat pemeratakan perkeekonomian Indonesia. Harapannya dengan pembangunan yang merata. Kemiskinan dapat ditekan dan perkeekonomian Indonesia bertumbuh dengan baik secara berkelanjutan.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Analisis Kemiskinan, PDRB, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, bantuan berupa motivasi, nasehat, tenaga, pikiran, materi dan saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

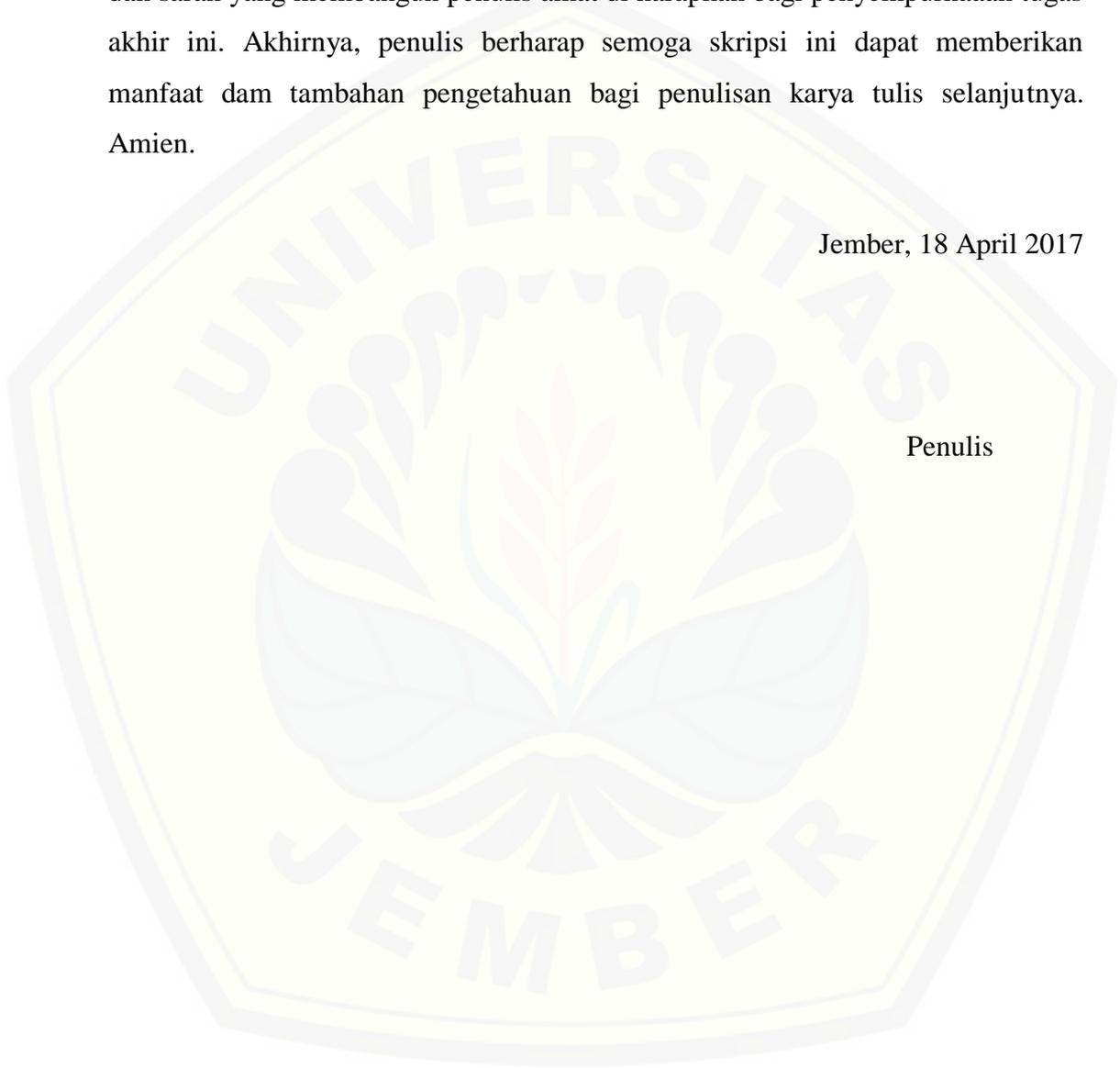
1. Ibu Dr. Siti Komariyah, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Lilis Yulianti, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi, saran dan kritik serta pengarahan terhadap penulis;
2. Bapak Dr. M. Miqdad, SE, MM,Ak,CA sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam mengerjakan penelitian ini;
3. Ibu Dr. Sebastiana Viphindrartin, SE, M.Kes. sebagai Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan penelitian ini dan motivasi;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Perpustakaan Pusat;
5. Kedua orang tua saya, Alm. Sarida Nova dan Ibu Ariyani terimakasih yang tak terhingga atas doa, dukungan, motivasi , kerja keras, kesabaran dan kasih sayang selama ini;
6. Andriana Okta Fara Diba yang selalu memberikan semangat dan menjadi partner yang terbaik dalam kondisi apapun;

7. Seluruh Sahabat – sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu – satu, terimakasih atas bantuan dan supportnya;

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna didunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis amat di harapkan bagi penyempurnaaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dam tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amien.

Jember, 18 April 2017

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN/SUMMARY	x
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	10
1.3 TUJUAN PENELITIAN	10
1.4 MANFAAT PENELITIAN	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 LANDASAN TEORI.....	12
2.1.1 TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI	12
2.1.2 TEORI KEMISKINAN.....	13
2.1.3 TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI.....	16
2.1.4 TEORI DISTRIBUSI PENDAPATAN	20
2.1.5 TEORI PENDIDIKAN	23
2.1.6 TEORI PENGELUARAN PEMERINTAH.....	24

2.2 PENELITAIN TERDAHULU	25
2.3 KERANGKA KONSEPTUAL.....	35
2.4 HIPOTESIS	38
BAB 3. METODE PENELITIAN	39
3.1 RANCANGAN PENELITIAN.....	39
3.1.1 JENIS PENELITIAN	39
3.1.2 UNIT ANALISIS DATA	39
3.1.3 JENIS DAN SUMBER DATA.....	39
3.2 METODE ANALISIS DATA	40
3.2.1 ANALISIS DATA PANEL.....	42
3.2.2 UJI STATISTIK.....	43
3.2.3 UJI ASUMSI KLASIK	45
3.3 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL.....	47
BAB 4. PEMBAHASAN	49
4.1 GAMBARAN UMUM	49
4.2 HASIL ANALISIS	50
4.2.1 HASIL LIKE HOOD	50
4.2.2 HASIL ANALISIS REGRESI DATA PANEL	51
4.2.3 HASIL UJI STATISTIK	53
4.2.4 HASIL UJI ASUMSI KLASIK	55
4.4 PEMBAHASAN	59
4.4.1 HASIL REGRESI	59
4.4.2 PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI.....	60
4.4.3 PENGARUH DISTRIBUSI PENDAPATAN.	61
4.4.4 PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN.....	63
4.4.4 PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH.....	64
BAB 5. PENUTUP	66
5.1 KESIMPULAN	66
5.2 SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1	Peneliti Terdahulu	32
4.1	Hasil Uji Like Hood	51
4.2	Hasil Analisis Data Panel Menggunakan Pendekatan Fix Effect	51
4.3	Hasil Uji F	54
4.4	Hasil Uji t	54
4.5	Hasil Uji Adjusted R-squared	55
4.6	Hasil Uji Multikolinieritas	56
4.7	Hasil Uji Heterokedastisitas	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1	Jumlah Populasi di Asia Tenggara (Ribuan Jiwa) Tahun 2015	5
1.2	Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Nasional (%) Tahun 2015	5
1.3	Data Persentase Jumlah Kemiskinan di Indonesia Tahun 1998 – 2016 ...	6
1.4	Data Persentase Kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi	7
1.5	Data Persentase Kemiskinan terhadap Index Gini di Indonesia	7
1.6	Data Persentase Kemiskinan terhadap Pendidikan di Indonesia Tahun ...	8
1.7	Data Persentase Kemiskinan terhadap Pengeluaran Pemerintah	9
2.1	Lingkaran Kemiskinan	15
2.2	Kurva Lorenz	22
2.3	Kerangka Konsep	35
4.1	Pertumbuhan PDB Sisi Penggunaan	15
4.2	Hasil Uji Normalitas	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1.	Data Kemiskinan,	73
2.	Data Pertumbuhan Ekonomi	74
3.	Data Indeks Gini	75
4.	Data Pendidikan	76
5.	Data Pengeluaran Pemerintah	77
6.	Hasil Pendekatan Common Effect di 33 Provinsi di Indonesia.....	78
7.	Hasil Pendekatan Random Effect di 33 Provinsi di Indonesia	79
8.	Hasil Like Hood Test di 33 Provinsi di Indonesia.....	80
9.	Hasil Hausman Test di 33 Provinsi di Indonesia.....	81
10.	Hasil Multikolinieritas di 33 Provinsi di Indonesia.....	82
11.	Hasil Normalitas di 33 Provinsi di Indonesia	83
12.	Hasil Heterokedastisitas di 33 Provinsi di Indonesia	84

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu inti permasalahan dari pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah yang serius dan sudah lama mengendap di masyarakat Indonesia. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, namun dapat juga dilihat dari aspek sosial baik dari segi penyebab dan dampak yang ditimbulkan. Timbulnya masalah sosial seperti kebodohan, pengangguran, perselisihan, kurangnya higienitas, kematian ibu dan anak, putus sekolah, tingkat kriminalitas merupakan dampak dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu dinamika masalah sosial ekonomi yang digambarkan oleh terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan (Todaro dan Smith, 2009:251).

Tujuan utama kebijakan pembangunan ekonomi di banyak negara dengan menanggulangi kemiskinan dan distribusi pendapatan dan juga memerlukan GNP yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat. Dalam melakukan pembangunan ekonomi maka diperlukan kebijakan alternatif yang dapat menekan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan yang sangat lebar dinegara berkembang (Todaro dan Smith, 2009:18).

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah hanya segelintir orang atau sebagian besarmasyarakat. Jika hanya segelintir orang yang menikmati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan, sebaliknya jika sebagian besar turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan *gap* antara orang kaya dan orang miskin dapat diperkecil (Todaro dan Smith, 2009:251).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi

pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat kerja. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal (Siregar dan Wahyuniarti, 2008).

Dalam studi yang melihat hubungan pertumbuhan dengan kemiskinan dilakukan oleh Squire (dalam Agussalim 2009). Ia melakukan studi dengan melakukan analisis regresi antara tingkat penurunan kemiskinan dengan tingkat pertumbuhan. Hasilnya, jika terjadi kenaikan 1% dalam pertumbuhan ekonomi akan mengurangi jumlah penduduk miskin (pendapatan dibawah 1\$/hari) sebesar 0,24%.

Kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari masalah ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Todaro dan Smith (2009;289), kesenjangan pendapatan yang lebar dan kemiskinan yang absolut yang substansial dapat menimbulkan insentif materi dan psikologis yang negatif terhadap kemajuan teknologi. Berdasarkan karakteristik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi yang tidak seragam. Dengan tidak seragamnya pembangunan ekonomi berdampak pada berkembangnya suatu wilayah untuk tumbuh. Seberapa cepatnya suatu wilayah dalam berkembang berpengaruh pada ketimpangan pembangunan dan pendapatan suatu daerah dengan daerah lain.

Menurut Djojohadikusumo (dalam Sari, 2006) Ketimpangan di dalam distribusi pendapatan menggambarkan hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati sebagian besar pendapatan negara. Sebaliknya sebagian besar masyarakat yang terdiri dari karyawan dan buruh hanya menikmati sedikit dari pendapatan negara. Masalah ketimpangan distribusi pendapatan ini menyebabkan

adanya suatu jurang antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin sehingga yang miskin sulit keluar dari kemiskinan.

Pengaruh distribusi pendapatan terhadap penurunan kemiskinan dijelaskan melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Daniel Suryadarma, dkk (2005), dalam penelitiannya didapat hasil bahwa walaupun ketika terjadi krisis semua metode pengukuran menunjukkan penurunan ketimpangan, namun sebenarnya terjadi peningkatan tetapi dibawah garis kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan adanya penjelasan penting yaitu bahwa tingkat kemiskinan menurun dengan cepat antara tahun 1999 dan 2002, yang disebabkan karena ketimpangan selama krisis pada tahun 1999 berada pada tingkat paling rendah.

Dalam mendapatkan pendidikan yang tinggi seseorang akan berusaha dengan harapan ia akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik pada sektor modern di masa yang akan datang. Dengan pekerjaan yang lebih baik, diharapkan kondisi perekonomian seseorang atau suatu keluarga menjadi lebih baik pula. Secara makro, dengan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kualitas sistem pendidikan kita diharapkan di masa depan perekonomian Indonesia juga dapat bergerak ke arah yang lebih baik sehingga problematika kemiskinan dapat teratasi. Kemiskinan yang meluas akan menciptakan dimana kaum miskin tidak bisa mendapatkan pinjaman, tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka (Todaro dan Smith, 2009:288).

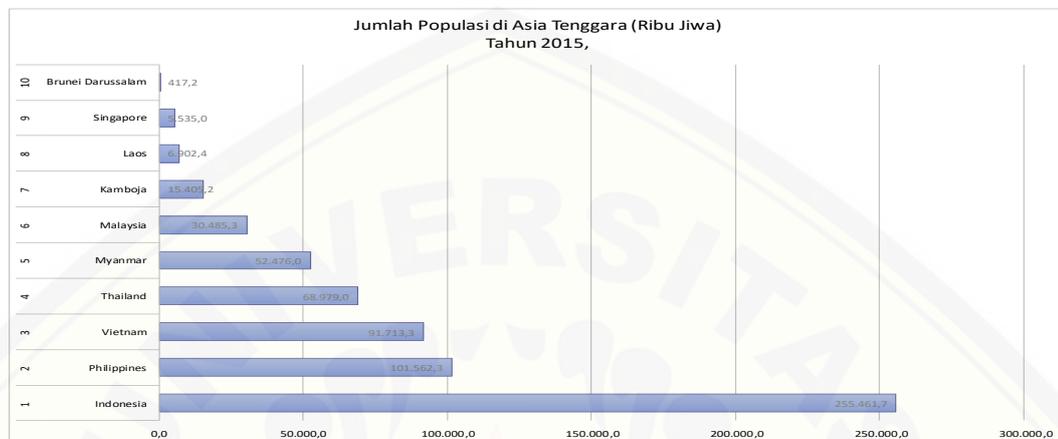
Menurut Rasidin (dalam Prastyo, 2010) rendahnya produktivitas masyarakat miskin dapat disebabkan rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan. Dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tingginya pendidikan, maka pengetahuan dan keahlian seseorang akan meningkat yang nantinya mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Meningkatnya produktivitas seseorang dalam bekerja akan berdampak pada perusahaan nantinya akan memberikan gaji yang lebih sesuai dengan produktivitas dari seseorang dalam bekerja. Pada nantinya seseorang dengan produktivitas tinggi maka akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih

baik, yang didapat dengan meningkatnya pendapatan maupun tingkat konsumsinya.

Menurut laporan World Bank dalam laporan Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2006) bahwa disamping pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial, dengan menentukan sasaran pengeluaran untuk rakyat miskin, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non-pendapatan) dengan beberapa hal. Pertama, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kedua, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan.

Pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur dan jasa di daerah pedesaan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan di sektor pertanian yang menjadi sektor terbesar terjadinya kemiskinan di negara berkembang. Selain itu pengeluaran pembangunan untuk teknologi dan modal manusia juga merupakan faktor yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di negara berkembang, khususnya negara-negara di Afrika. Dalam penelitian sebelumnya Fan (et al.,1999) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak secara langsung dan dampak tidak langsung terhadap penduduk miskin. Ia mengatakan dampak langsung pengeluaran pemerintah adalah manfaat yang diterima penduduk miskin dari berbagai program peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pekerja, serta skema bantuan dengan target penduduk miskin. Dampak tidak langsung berasal dari investasi pemerintah dalam infrastruktur, riset, pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi penduduk, yang secara simultan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh sektor dan berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan peningkatan pendapatan terutama penduduk miskin serta lebih terjangkau harga kebutuhan pokok (Fan, 2004).

Pada tahun 2015 populasi di Indonesia telah lebih dari 250 juta jiwa dengan demikian Indonesia menduduki peringkat pertama jumlah populasi penduduk terbanyak di Asia Tenggara yang disajikan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1.1 Jumlah Populasi di Asia Tenggara (Ribuan Jiwa) Tahun 2015 (Sumber : Asean Statistical Leaflet, diolah)

Pada Gambar 1.1 menunjukkan Indonesia memiliki populasi tertinggi di wilayah Asia Tenggara serta didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sehingga hal tersebut dapat menjadi bonus bagi demografi Indonesia untuk meningkatkan pembangunan. Melimpahnya sumber daya manusia dan sumber daya alam tidak menjadikan Indonesia negara yang terbebas dari kemiskinan (Asean Statistical Leaflet, 2015).

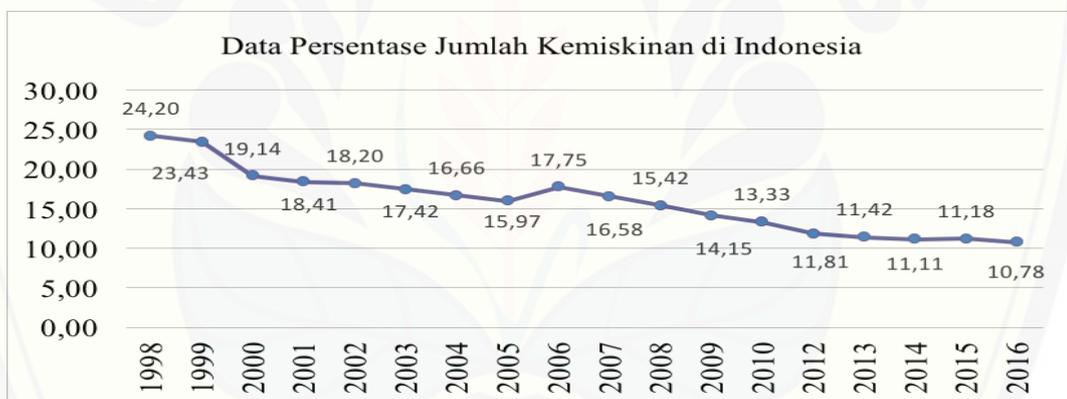
Kemiskinan di negara–negara Asia Tenggara memiliki nilai yang rentan jauh di beberapa negara dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 1.2 Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Nasional (%) Tahun 2015
(Sumber : Asian Development Bank, diolah)

Terlihat pada Gambar 1.2 kemiskinan di negara–negara Asia Tenggara memiliki nilai yang rentan jauh di beberapa negara. Kemiskinan di Indonesia menduduki peringkat ke 5 di Asia Tenggara yaitu sebesar 10.9% dari Total Jumlah Penduduk Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara lainnya Indonesia dengan Jumlah Penduduk terbanyak juga memiliki masalah kemiskinan yang harus di tangani agar tingkat kemiskinan di Indonesia dapat berkurang (Asian Developmen Bank).

Data persentase kemiskinan yang di terbitkan oleh Badan pusat statistik pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuatif.

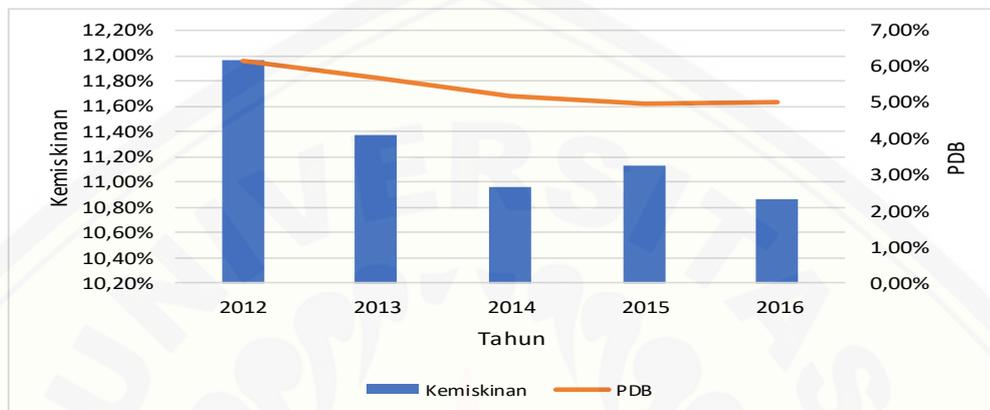


Gambar 1.3 Data Persentase Jumlah Kemiskinan di Indonesia Tahun 1998 – 2016
(Sumber : Badan Pusat Statistika 2017, diolah)

Gambar 1.3 menjelaskan kemiskinan di Indonesia. Dari tahun 1998 hingga tahun 2012 kemiskinan dapat diturunkan menjadi 11,81 %. Pada tahun 2012 pemerintah mengatasi kemiskinan dengan cara menjalankan dua program yaitu bantuan tunai bersyarat :BSM, yang difokuskan pada bidang pendidikan, dan PHK (Program Keluarga Harapan) untuk bidang keseharan dan pendidikan. Dua program tersebut difasilitasi peluncuran kartu pintar (Survei Ekonomi OECD Indonesia, 2015).

Kuncoro (2009:43-44) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan suatu dinamika eksklusi sosial-ekonomi yang digambarkan oleh terjadinya pertumbuhan

ekonomi yang tidak disertai oleh pemerataan. Seperti yang telah kita ketahui, pertumbuhan ekonomi direpresentasikan oleh produk domestik bruto (PDB). Tetapi berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) ketika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan diikuti dengan menurunnya tingkat kemiskinan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.4 Data Persentase Kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Tahun 2012 – 2016
(Sumber : Badan Pusat Statistika 2017, diolah)

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 hingga tahun 2015 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Kegagalan pemerintah dalam mengatur sistem pemberian upah kepada pekerja menjadi salah satu pendorong gagalnya pertumbuhan ekonomi mengatasi kemiskinan (BPS, 2017)

Persentase kemiskinan terhadap index gini tahun 2012 hingga 2016 di Indonesia. Dari data menunjukkan bahwa ketika gini ratio cenderung konstan pada tahun 2012 hingga 2014 yang berarti distribusi pendapatan tidak terlalu merata akan tetapi tingkat kemiskinan mengalami penurunan dapat dilihat pada gambar 1.5 :

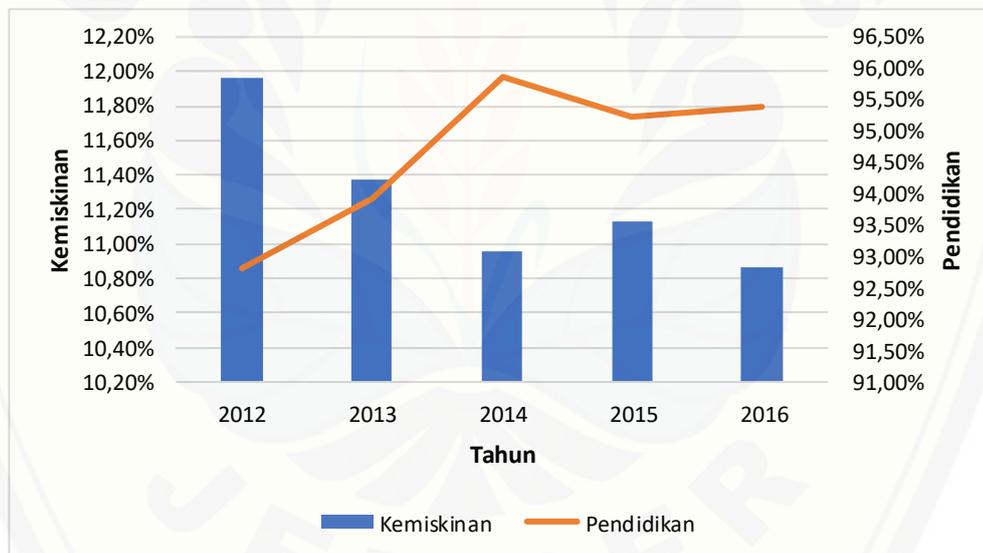


Gambar 1.5 Data Persentase Kemiskinan terhadap Index Gini di Indonesia Tahun 2012 – 2016

(Sumber : Badan Pusat Statistika 2017, diolah)

. Pada tahun 2015 gini ratio mengalami penurunan disertai dengan meningkatnya presentasi kemiskinan pada tahun 2015. Dan pada tahun 2016 gini ratio cenderung konstan akan tetapi presentase kemiskinan mengalami penurunan pada tahun 2016 (BPS, 2017)

Berdasarkan data dari tahun 2012 hingga 2014 ketika pendidikan semakin meningkat atau semakin banyak orang yang bersekolah terlihat bahwa persentase kemiskinan mengalami penurunan dapat kita lihat pada gambar dibawah ini :

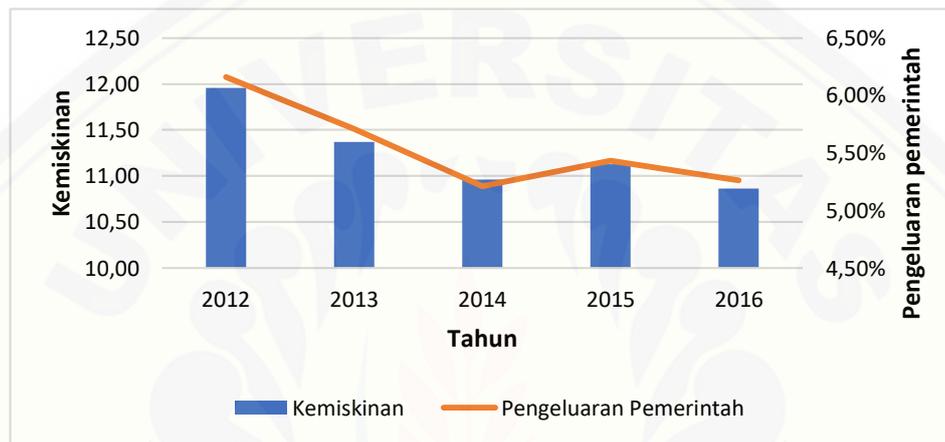


Gambar 1.6 Data Persentase Kemiskinan terhadap Pendidikan di Indonesia Tahun 2012 – 2016

(Sumber : Badan Pusat Statistika 2017, diolah)

Gambar 1.6 menunjukkan data persentase kemiskinan terhadap pendidikan di Indonesia tahun 2012 hingga 2016. Pada tahun 2015 ketika persentase pendidikan mengalami penurunan maka tingkat kemiskinan mengalami peningkatan, dan tahun 2016 pendidikan mengalami peningkatan maka diiringi dengan menurunnya tingkat kemiskinan (BPS, 2017).

Data persentase kemiskinan terhadap pengeluaran pemerintah di Indonesia tahun 2012 hingga 2016. Berdasarkan data dari tahun 2012 hingga 2016 pada gambar 1.6 ketika persentase pengeluaran pemerintah mengalami penurunan disertai dengan menurunnya persentase kemiskinan, begitu juga sebaliknya ketika persentase pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan maka persentase kemiskinan juga mengalami peningkatan dapat kita lihat dalam gambar dibawah ini (BPS, 2017)



Gambar 1.7 Data Persentase Kemiskinan terhadap Pengeluaran Pemerintah di Indonesia Tahun 2012 – 2016
(Sumber : Badan Pusat Statistika 2017, diolah)

Pengeluaran pemerintah berperan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Menurut Sukirno (2006;168) membayar gaji pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan, kesehatan masyarakat, belanja angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting. Belanja tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. Pada era Jokowi sebagian pengeluaran pemerintah yang bersifat subsidi dikurangi dan diperuntukan pengeluaran pemerintah yang bersifat membangun infrastruktur. Dengan demikian dampak yang diberikan dengan membangun infrastruktur ini tidak dapat dirasakan langsung untuk mengentaskan kemiskinan akan tetapi dampaknya akan dirasakan beberapa tahun kedepan setelah infrastruktur merata di Indonesia.

Untuk itu beberapa masalah pembangunan yang tidak kunjung selesai harus diberikan solusi guna memecahkan masalah pembangunan yang mulai asimetris dengan indikator keberhasilan pembangunan. Berdasarkan studi empiris dan fenomena kemiskinan di Indonesia penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pendidikan, dan pengeluaran pemerintah terhadap persentase kemiskinan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu negara. Penyebab kemiskinan adalah lingkaran kemiskinan yang tidak berujung. Maka dari itu rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan latar belakang sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap persentase kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh distribusi pendapatan terhadap persentase kemiskinan di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap persentase kemiskinan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap persentase kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh jumlah Pertumbuhan Ekonomi terhadap persentase kemiskinan di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh distribusi pendapatan terhadap persentase kemiskinan di Indonesia.

3. Menganalisis pengaruh pendidikan terhadap persentase kemiskinan di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap persentase kemiskinan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai media bagi penulis untuk mengembangkan diri sebagai mahasiswa yang menerapkan ilmunya yang didapat dari dalam kelas
2. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan bahan belajar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada umumnya dan mahasiswa jurusan ilmu ekonomi studi pembangunan pada khususnya
3. Dapat digunakan sebagai salah satu sumber masukan kepada pemerintah dalam hal membuat program dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembangunan daerah khususnya pengurangan kemiskinan di Indonesia
4. Sebagai masukan dan bahan referensi bagi peneliti-peneliti yang lain dengan karakteristik penelitian sejenis

BAB II

TINJAUAN PUSATAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Prof.Dudley Seers dalam Todaro dan Smith (2009:17) tentang indikator pembangunan ekonomi suatu negara. Menurutnya jika ada negara yang mengklaim telah melakukan pembangunan, maka patut dipertanyakan terkait dengan masalah kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan negara tersebut. Untuk itu Indonesia menetapkan salah satu sasaran pembangunan adalah pengentasan kemiskinan.

Menurut Todaro dan Smith (2009:18) pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pada hakikatnya pembangunan mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan berbagai kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok – kelompok sosial dalam sistem tersebut. Pembangunan seharusnya merupakan upaya untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin.

Konsep pembangunan adalah lebih luas dari teori pembangunan ekonomi yang konvensional, termasuk model pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pada mulanya hanya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai wujud dari kesejahteraan penduduk yang khususnya berada di daerah negara berkembang, tetapi perlu adanya tujuan pembangunan yang lain seperti : pembangunan SDM, pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kebutuhan dasar manusia. Arah dan konsep pembangunan di arahkan pada tujuan pemerataan sebagaimana konsep redistribusi pertumbuhan yang menitik beratkan pada mekanisme ekonomi, sosial, dan institusional demi meningkatkan standard hidup masyarakat (Todaro dan Smith, .dalam Trifani, 2015:9).

Pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental (*state of mind*) dari suatu masyarakat telah, melalui kombinasi tertentu dalam proses sosial, ekonomi, dan lembaga memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik tersebut, pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan berikut (Todaro dan Smith, 2009:27) :

- a. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang – barang kebutuhan hidup yang pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.
- b. Peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai – nilai budaya dan kemiskinan. Secara keseluruhan, hal – hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materi (*material well – being*) tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa.

Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari ketergantungan terhadap orang atau negara – negara lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai – nilai kemanusiaan mereka.

2.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan adalah dimana seseorang dalam keadaan kekurangan uang dan barang untuk kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Menurut Chambers (dalam Suryawati, 2005) mengatakan kemiskinan adalah suatu konsep yang terintegrasi yang memiliki lima dimensi, yaitu 1) kemiskinan, 2) ketidak berdayaan, 3) kerentanan menghadapi situasi darurat, 4) ketergantungan, dan 5) keterasingan baik secara geografis maupun sosiologis.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan (Mas'ood dalam Suryawati, 2005), yaitu :

1. Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.

2. Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Todaro (2009:151) mengatakan bahwa masalah kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi pendapatan saja, melainkan juga dilihat dari segi kemampuan dan kemudahan untuk mengakses informasi di bidang kesehatan, pendidikan, maupun peluang kerja. Kebutuhan dasar manusia akan selalu berkembang mengikuti kemajuan peradaban, kini kebutuhan akan informasi sangat penting untuk melancarkan kegiatan masyarakat.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang menjadi pusat perhatian pemerintah di Negara manapun. Menurut BPS, kemiskinan itu sendiri dapat didefinisikan dalam beberapa pengertian relative antara lain :

1. Kemiskinan *Relative*

Merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

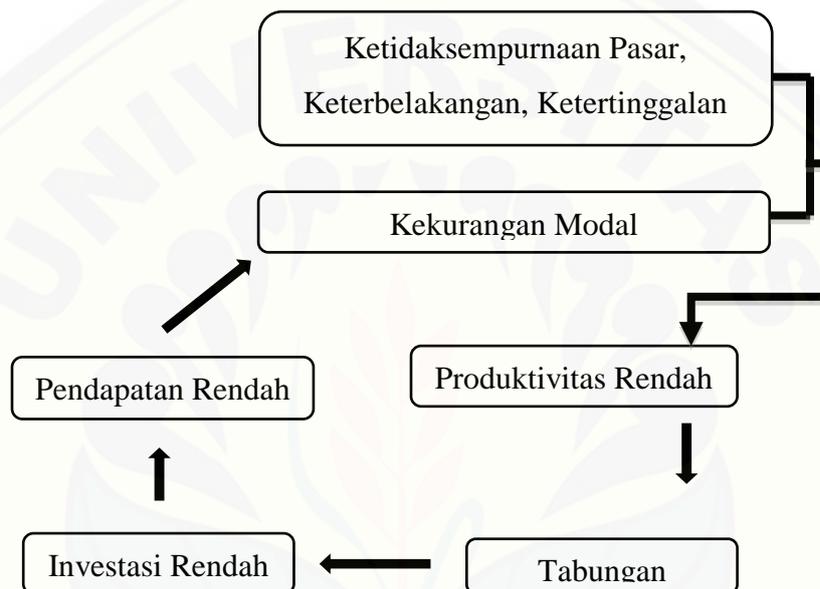
2. Kemiskinan *Absolute*

Ditentukan berdasarkan kebutuhan pokok minimum seperti; pangan, sandang, kesehatan perumahan dan pendidikan yang diperlukan.

Menurut sajogoyo (dalam Mariah,2016) kemiskinan sebagai suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar minum yang di tetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat, berdasar atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi, sedangkan menurut samuelso yaitu penyebab terjadinya penduduk miskin di Negara yang penghasilannya rendah yaitu rendahnya tingkat kesehatan, gizi , dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan

Ragnar Nuske (dalam Kuncoro, 2000) seorang ekonom pembangunan ternama di tahun 1953 mengatakan “ *a poor country is poor because it is poor*” yang artinya negara itu miskin karena dia miskin. Tiga penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal

menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas akan menyebabkan rendahnya pendapatan yang akan diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Ragnar nuske menggambarkan kemiskinan dalam lingkaran setan kemiskinan yaitu :



Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan
Sumber : R. Nurske (dalam Kuncoro,2000;107)

2.1.1.1 Ukuran Kemiskinan

Menurut BPS bahwa tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua unsur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis

2.1.1.2 Mengukur Kemiskinan

Kemiskinan dapat diukur melalui BPS dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs) yang diukur menggunakan angka atau hitungan indeks perkepala (Head Count Index), yakni jumlah dan presentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk dengan nilai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan berada pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga angka kemiskinan dapat dikurangi dengan mencari kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di setiap waktu.

Rumus penghitungan garis kemiskinan (Menurut BPS) :

$$GK = GKM + GKBM$$

Keterangan :

GK = Garis kemsikinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKBM = Garis Kemiskinan Bukan Makanan

Dengan nilai 2100 kkalori per kapita per hari merupakan pengeluaran minimum kebutuhan makanan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM). Komoditi kebutuhan dasar makanan ini diwakili 52 jenis komoditi.

Untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan merupakan kebutuhan minimum dari Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) yang diwakili oleh komoditi kebutuhan dasar nonpangan dengan nilai 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Todaro dan Smith (2009:251) Menurutnya *Gross Domestic Produk/Product Domestic Bruto* (pertumbuhan ekonomi) yang cepat menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi. Namun masalah fundamental bukan hanya menumbuhkan GNI, tetapi siapakah yang akan menumbuhkan GNI tersebut, sejumlah orang yang ada dalam suatu negara ataukah hanya segelintir orang saja. Jika hanya segelintir orang yang menubuhkan GNI ataukah orang-orang kaya yang jumlahnya sedikit, maka

manfaat dari pertumbuhan GNI itu pun hanya dinikmati oleh mereka saja sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah. Sedangkan menurut Tarigan (2004) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah tersebut.

Sedangkan menurut Tarigan (2004) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah tersebut.

Menurut pandangan kaum historis, Friedrich List dan Rostow, pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan proses tumbuhnya perekonomian mulai dari perekonomian bersifat tradisional yang bergerak di sektor pertanian dimana produksi bersifat subsisten, hingga akhirnya menuju perekonomian modern yang didominasi oleh sektor industri manufaktur. Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Kuncoro, dalam Prastyo, 2010). Sedangkan menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi, dan pelakunya adalah inovator atau wiraswasta (*entrepreneur*). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para *entrepreneur*.

Menurut Todaro(dalam Prastyo, 2010), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (*human resources*). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di tabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk

memperbesar output di masa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap angka produksi.

2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angka kerja (labor force) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.
3. Kemajuan Teknologi. Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni :
 - a. Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.
 - b. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (labor saving) atau hemat modal (capital saving), yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama
 - c. Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif

2.1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto

PDRB menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menjadi indikator untuk mengukur suatu wilayah bagaimana kegiatan ekonomi terjadi. dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu PDRB yang dihasilkan

masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor kemampuan pemerintah mengelola sumber daya yang dimiliki.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Cara perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu (BPS,2012) :

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit- unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit – unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha (katagori) :

- a. Pertanian, Kehutanan, Perikanan
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industri Pengelolaan
- d. Pengadaan Listrik, Gas
- e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- f. Konstruksi
- g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- h. Transportasi dan Pergudangan
- i. Penyediaan Komunikasi dan Makan Minum
- j. Informasi dan Komunikasi
- k. Jasa Keuangan dan Asuransi
- l. Real Estat
- m. Jasa Perusahaan
- n. Administrasi Pemerintahan; Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- o. Jasa – Jasa Pendidikan
- p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- q. Jasa Lainnya.

2. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- a. Pengeluaran konsumsi dan rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- b. Pengeluaran konsumsi pemerintah
- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto
- d. Perubahan inventori
- e. Ekspor netto

3. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor – faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

2.1.4 Distribusi Pendapatan

Todaro (2009:251) menjadi landasan penting dalam melihat hubungan antara distribusi pendapatan dan kemiskinan. Menurutnya *Gross domestic Produk/Product Domestic Bruto* (pertumbuhan ekonomi) yang cepat menjadi salah syarat tercapainya pembangunan ekonomi. Namun Masalah dasarnya bukan hanya menumbuhkan GNI, tetapi juga siapakah yang akan menumbuhkan GNI tersebut, sejumlah orang yang ada dalam suatu Negara ataupun hanya segelintir orang. Jika hanya segelintir orang yang menubuhkan GNI atautkah orang-orang kaya yang berjumlah sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan GNI itu pun hanya dinikmati oleh mereka saja sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah.

Menurut Irma Adelma dan Cynthia Taft Morris (dalam Lincoln Arysad, 1997) ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara sedang berkembang :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.

2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang – barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak yang sangat banyak dalam proyek – proyek yang padat modal (Capital Insentve)
5. Rendahnya mobilitas social
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga – harga barang hasil industri untuk melindungi usaha – usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi Negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan Negara – Negara maju, sebagai akibat ketidakelestarian permintaan Negara – Negara maju terhadap barang – barang ekspor Negara sedang berkembang.
8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain – lain.

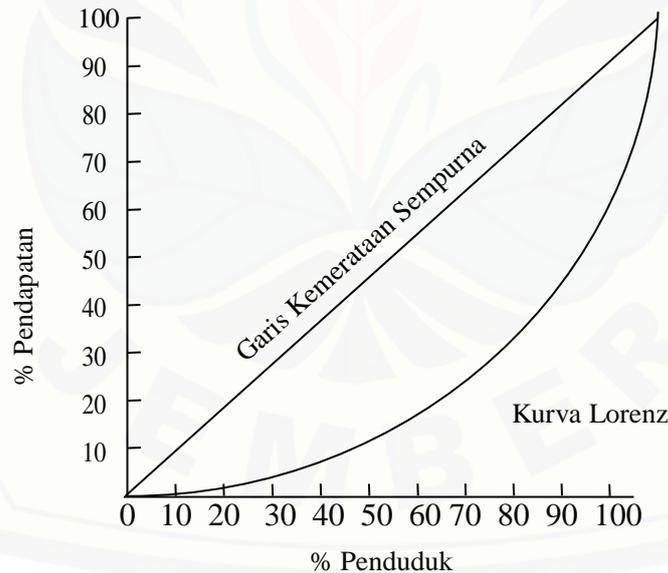
Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Distribusi pendapatan sebagai suatu ukuran dibedakan menjadi dua ukuran pokok, baik untuk tujuan analisis maupun untuk tujuan kuantitatif (Todaro, 2009:253) yaitu:

1. Pendapatan ”personal” atau distribusi pendapatan berdasarkan ukuran atau besarnya pendapatan. Distribusi pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan berdasarkan besarnya pendapatan paling banyak digunakan ahli ekonomi. Distribusi ini hanya menyangkut orang per orang atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima, dari mana pendapatan yang mereka peroleh tidak dipersoalkan. Tidak dipersoalkan pula berapa banyak yang diperoleh masing-masing individu, apakah merupakan hasil dari pekerjaan mereka atau berasal dari sumber-sumber lain. Selain itu juga diabaikan sumber-sumber pendapatan yang menyangkut lokasi (apakah di wilayah desa atau kota) dan jenis pekerjaan.

2. Distribusi pendapatan “fungsional” atau distribusi pendapatan menurut bagian faktor distribusi. Sistem distribusi ini mempertimbangkan individu-individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah.

2.1.3.1 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz (Arsyad, 1997:54) menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata.



Gambar 2.2 Kurva Lorenz

Sumber : Lincoln Arsyad (1997:54)

Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva

Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata.

2.1.3.2 Index Gini

C.GINI (Arysad, 1997;83) mengemukakan bahwa pada koefisien Gini atau Gini ratio terdapat hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran ini sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

Rumus untuk menghitung nilai Gini Ratio :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10000}$$

Keterangan : G = Gini Ratio

P_i = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i

k = Banyaknya kelas pendapatan

Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna.

2.1.5 Pendidikan

Menurut Psacharopoulos (dalam Purwita dkk, 2012), tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam mengatasi distribusi pendapatan dan kemiskinan. Bahwa pendidikan dapat mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara langsung, dengan cara meningkatkan produktivitas bagi golongan miskin, pendidikan juga dapat memperbaiki kesempatan kerja untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih baik, dan membuka jalur hubungan vertikal bagi anak-anak mereka. Karena secara tidak langsung dengan pendidikan yang tinggi dapat memberikan kemampuan yang lebih tinggi bagi golongan miskin memperoleh bagian mereka dari total pendapatan.

Menurut Gillis (dalam Purwita dkk, 2012) terdapat dua alasan mengapa pendidikan itu penting:

1. Terdapat banyak permintaan yang tinggi untuk pendidikan, hal ini terjadi karena masyarakat dimana saja percaya bahwa pendidikan dapat memberikan keuntungan bagi diri mereka dan juga anak-anak mereka. Namun di negara-negara berkembang masih banyak yang belum dapat menampung permintaan pendidikan, karena belum banyak terdapat sekolah terutama di pedesaan dan daerah-daerah terpencil lainnya, sehingga masih banyak terdapat penduduk yang belum dapat mengenyam pendidikan.
2. Alasan lainnya adalah karena telah banyak dilakukan observasi yang menyebutkan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka pendapatan dan kedudukan sosial seseorang di masyarakat akan dapat terangkat. Walaupun tidak semua orang yang menyelesaikan sekolahnya lebih baik dari yang tidak bersekolah atau menyelesaikan sekolahnya, namun rata-rata mereka yang menyelesaikan sekolahnya menghasilkan pendapatan lebih banyak. Oleh karena itu orang-orang di seluruh dunia menyadari hal itu sehingga mereka berusaha agar anak-anak mereka nanti mendapatkan pendidikan yang tinggi. Pada negara-negara berkembang kini mulai memperhatikan pentingnya pendidikan karena pendidikan dianggap dapat meningkatkan pembangunan.

2.1.6 Pengeluaran Pemerintah

Menurut Dollar dan Kray (2001) setelah melakukan pengamatan terhadap stabilitas makro, disiplin fiskal dan belanja publik untuk kesehatan dan pendidikan menemukan bahwa kuat dugaan kebijakan *pro poor* seperti belanja publik untuk kesehatan dan pendidikan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap pendapatan kaum miskin. Sebaliknya pendapatan kaum miskin memiliki hubungan yang sistematis terhadap kebijakan publik misalnya disiplin fiskal, stabilitas makro ekonomi, penegakan hukum dan keterbukaan dalam perdagangan internasional. Menurut mereka seringkali di negara berkembang kebijakan *pro poor* tersebut hanya dinikmati oleh kelompok menengah dan kaya

dari pada kelompok miskin. Ini terjadi misalnya pada subsidi BBM (bahan bakar minyak) atau listrik dimana sebagian besar yang menikmati subsidi tersebut hanya mereka yang berpendapatan menengah keatas.

Menurut Todaro (dalam Azwar 2006) bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh salah satunya tingkat pendapatan rata-rata daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat pendapatannya maka potensi untuk mengalokasikan anggaran guna menyelesaikan masalah kemiskinan akan semakin besar. Namun alokasi tersebut tentu harus tepat sasaran, jika tidak justru akan menyebabkan kemiskinan akan semakin memburuk dan akan menghasilkan kekacauan sosial (social chaos).

Menurut World Bank dalam laporan Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2006) bahwa disamping pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial, dengan menentukan sasaran pengeluaran untuk rakyat miskin, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non-pendapatan) dengan beberapa hal. Pertama, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kedua, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan.

2.2 Peneliti Terdahulu

Studi mengenai Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti. Secara ringkas disaikan ringkasan peneliti penelitian sejenis yang menjadi referensi dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Minh Quang Dao (2008) melakukan penelitian yang berjudul “Human capital, poverty, and income distribution in developing countries” yang mengkaji dampak komponen modal manusia terhadap tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan di negara – negara berkembang. Penelitian ini menggunakan teknik estimasi kuadrat terkecil dalam regresi linier

multivariant diterapkan. Dengan menggunakan sampel 35 negara berkembang lainnya, ditemukan bahwa ketidaksetaraan pendapatan secara linear bergantung pada variabel penjelas yang sama ditambah angka kematian bayi dan tingkat penyelesaian sekolah dasar. Implikasi Praktis Hasil statistik dari pemeriksaan empiris tersebut akan membantu pemerintah di negara-negara tersebut mengidentifikasi daerah-daerah yang perlu diperbaiki untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu negara-negara tersebut mengidentifikasikan daerah yang perlu diperbaiki untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan di negara-negara berkembang.

- b. Arius Jonaidi (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia” yang mengkaji tentang pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang ada di Indonesia dengan variabel pengangguran, kemiskinan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data panel atau cross time series series dengan data time series dari tahun 2005 - 2009, dan persentasenya adalah bahwa ada 33 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis ekonometrik dengan menggunakan model persamaan simultan (model persamaan simultan) dengan metode two-stage least squares (Two-Stage Least Square 2SLS) dengan menggunakan Least Square (ILS) tidak langsung. Hasilnya menunjukkan bahwa ada interaksi dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Efek signifikan pada pertumbuhan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan ada banyak kantong kemiskinan. Kebalikan dari kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan peningkatan akses terhadap modal, kualitas pendidikan (melek huruf dan peningkatan lama pendidikan) dan kesehatan (peningkatan harapan hidup) orang miskin dapat meningkatkan produktivitas mereka dalam usaha selama periode 2000 - 2009. Tingkat pengangguran, dan investasi signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, investasi

investasi dalam negeri dan luar negeri, harapan hidup, melek huruf dan sekolah lebih lama berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

- c. N.P Mahesa Eka Rawita dan Made Suyana Utama (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar” penelitian ini menjelaskan untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan data sekunder selanjutnya dianalisis dengan menggunakan alat analisis Tipologi Klassen, Indeks Williamson dan Regresion Curve Estimation. Hasil analisis Tipologi Klassen, Kabupaten Gianyar diklasifikasikan menjadi empat: daerah maju dan cepat tumbuh, daerah berkembang cepat tetapi tidak maju, daerah maju tetapi tertekan, dan daerah yang relatif tertinggal. Berdasarkan Indeks Williamson ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Gianyar secara umum meningkat dari periode 1993 sampai dengan 2009. Meskipun meningkat ketimpangannya masih relatif rendah rata-rata nilainya sebesar 0,300 (masih dibawah 0,5). Hipotesis Kuznets yang menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan yang berbentuk U terbalik berlaku di Kabupaten Gianyar Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan disarankan agar memprioritaskan daerah yang relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah yang sudah maju, memperhatikan aspek pemerataan dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
- d. Wuku Astuti (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007 – 2011)” penelitian ini menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sebanyak 73 kabupaten dipilih dari populasi kabupaten/kota di pulau jawa. Teknik analisis menggunakan

regresi berganda untuk menguji hubungan antara variabel terikat dengan variabel tergantung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian dan rasio efektivitas berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efisiensi tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pengangguran, namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.

- e. Sunusi, dkk (2014) melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara Tahun 2001 – 2010” penelitian ini menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dengan jenis time series sejak tahun 2001 - 2010 yang didapat dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara. Penulis menggunakan metode Analisis Path dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah serta kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara. Khusus di Sulawesi Utara Pertumbuhan Ekonomi mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 terjadi kenaikan Pertumbuhan Ekonomi dari setiap tahunnya. Sedangkan, pada tahun 2010 terjadi penurunan. Kenaikan dan penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah, dan kemiskinan. Jumlah angkatan kerja di Sulawesi Utara terus mengalami kenaikan. Begitu pula yang terjadi pada tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah yang terus mengalami kenaikan. Berbeda dengan tingkat kemiskinan dimana setiap tahunnya
- f. Sudarlan (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Dan Kemiskinan Di Indonesia” penelitian ini

menguji mengetahui hubungan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia periode 2002 – 2011. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatoris dengan data time-series dan cross-section dan mengaplikasikan model persamaan simultan (2SLS). Penelitian ini berkesimpulan bahwa ketimpangan pendapatan mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan signifikan secara statistik, pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak positif terhadap ketimpangan tetapi penduduk miskin tidak signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh pada penduduk miskin di Indonesia.

- g. Suryadarma dkk(2005) dalam penelitiannya yang berjudul “A Reassessment of Inequality and Its Role in Poverty Reduction in Indonesia” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi ketimpangan di Indonesia pada saat pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang tinggi dan saat ekonomi Indonesia krisis. Serta menguji apakah ketimpangan berhubungan dengan kemiskinan di Indoneisa. Penelitian ini memberikan gambaran ketimpangan di Indonesia selama periode tahun 1984 hingga 2002 dengan menggunakan beberapa ukuran ketimpangan yaitu Indeks Gini, Generalized Entropy (GE) Index, dan Atkinson Index. Hasil penelitian ini ketimpangan mengalami flukstuasi. Sedangkan tingkat kemiskinan cenderung menurun dari tahun 1984 hingga tahun 2002. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ketimpangan mempunyai pengaruh negatif terhadap elastisitas pertumbuhan kemiskinan.
- h. Puruwita dkk (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Per Kapita Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di DKI Jakarta” penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana hubungan antara pendidikan, pendapatan per kapita dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia Dalam penelitian ini, data diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisisnya menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dijelaskan secara deskriptif tentang pendidikan, pendapatan per kapita, pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Analisis kuantitatif menggunakan Ordinary Least Squares (OLS)

dengan data sekunder. Regresi hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh secara statistik signifikan. (2) pendapatan per kapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh secara statistik signifikan. (3) pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan dan berpengaruh secara statistik signifikan

- i. Alawi (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Terhadap Kemiskinan Studi Kasus: Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2002 - 2004” penelitian ini mengamati proses bagaimana pendapatan daerah mempengaruhi kemiskinan, yaitu dengan melihat pola anggaran belanja untuk kebutuhan pembangunan yang dilokasikan kepada tiga jenis pengeluaran. Pertama, pengeluaran untuk kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pengeluaran untuk human capital investment. Ketiga, pengeluaran untuk menyediakan jaminan sosial. Temuan utama dari penelitian ini adalah pembuktian bahwa ketiga jenis pengeluaran tersebut berpengaruh terhadap ketiga jenis ukuran kemiskinan, yaitu: tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan di Jawa tengah. Lebih jauh lagi, penelitian ini mendukung hipotesa adanya hubungan yang searah antara usaha pertumbuhan ekonomi dan usaha mengurangi kemiskinan, terbukti dan hubungan yang negatif antara tingkat kemiskinan dengan pengeluaran dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
- j. Azwar dan Achmat Subekan (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Determinan Kemiskinan Di Sulawesi Selatan” penelitian ini Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2010 sampai 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari publikasi data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data-data tersebut ditabulasikan ke dalam struktur data panel yaitu gabungan antara data yang

berbentuk time series dan cross section dalam bentuk tahunan. Dengan teknik purposive sampling, penelitian ini menggunakan data 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian dianalisis dengan metode teknik Analisis Regresi Data Panel dengan pendekatan Random Effect. Hasil empiris membuktikan bahwa seluruh variabel determinan yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi regional, jumlah pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara secara parsial, variabel pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel-variabel lainnya yaitu pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

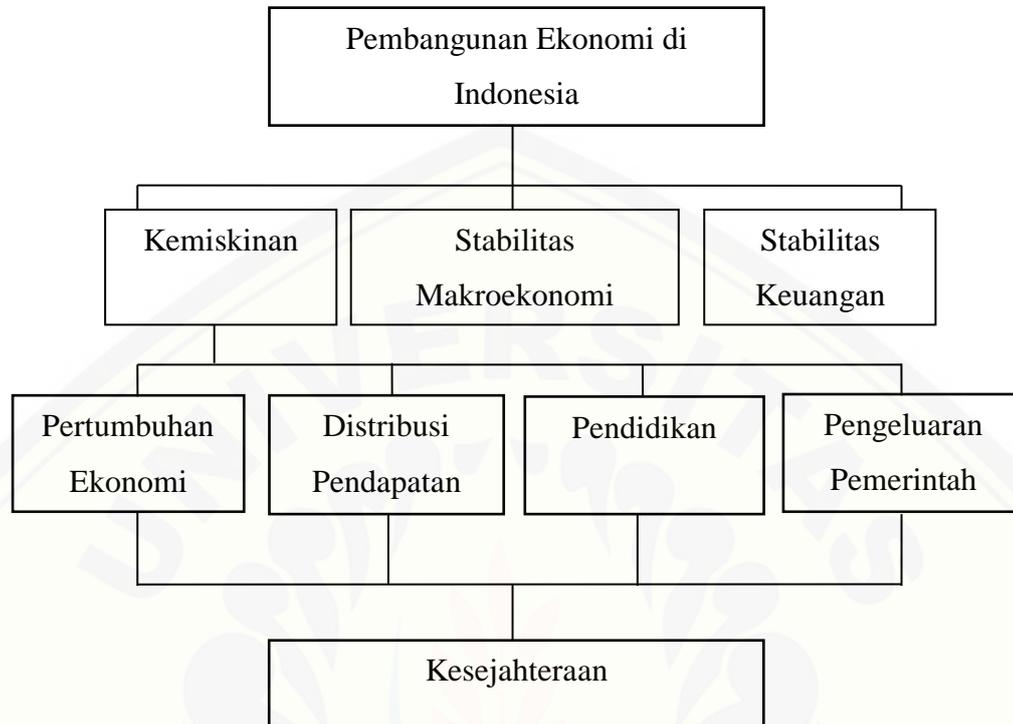
Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1	Minh Quang Dao (2008)	Human capital, poverty, and income distribution in developing countries	Kemiskinan, Gini Ratio, angka kematian ibu	Regeresi linier Multivariant	garis kemiskinan secara linear bergantung pada rasio paritas gender di sekolah dasar dan menengah, prevalensi malnutrisi anak, paritas daya beli per kapita pendapatan nasional bruto, angka kematian ibu, dan persentase kelahiran yang dihadiri oleh staf kesehatan yang terampil.
2	Arius Jonaidi (2012)	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia	Kemiskinan, Investasi, Harapan Hidup, Melek Huruf, Lama pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi	Data panel	Hasilnya menunjukkan bahwa ada interaksi dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Efek signifikan pada pertumbuhan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan ada banyak kantong kemiskinan. Kebalikan dari kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
3	N.P Mahesa Eka Raswita dan Made Suyana Utama (2013)	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar	Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan	Analisis Tipologi Klassen	Ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Gianyar periode 1993-2000 antar kecamatan pada periode tersebut mengalami peningkatan. Rata-rata angka Indeks Williamson di kabupaten Gianyar periode penelitian adalah sebesar 0,300. Kurva hubungan antara Indeks Williamson dengan pendapatan per kapita menunjukkan bentuk U terbalik, dapat dikatakan hipotesis Kuznets berlaku di Kabupaten Gianyar pada periode penelitian (1993 -2009).
4	Wuku Astuti (2015)	Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi	Pengangguran, Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi,	Regresi Berganda	Hasil pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pengangguran, namun tidak signifikan terhadap kemiskinan

		Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007 – 2011)			
5	Sunusi, dkk (2014)	Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara Tahun 2001 – 2010	Kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi, Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah	Analisis Path	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah serta kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara
6	Sudarlan (2015)	Pertumbuhan ekonomi, Ketimpangan, dan Kemiskinan di Indonesia	Kemiskinan, ketimpangan, pertumbuhan ekonomi	regresi two stage least square (2SLS)	Hasil penelitian bahwa ketimpangan pendapatan mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan signifikan secara statistik, pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak positif terhadap ketimpangan tetapi penduduk miskin tidak signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh pada penduduk miskin di Indonesia
7	Suryadarma dkk(2015)	A Reassessment of Inequality and Its Role in Poverty Reduction in Indonesia	Kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi, Distribusi Pendapatan	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian ini ketimpangan mengalami fluktuasi. Sedangkan tingkat kemiskinan cenderung menurun dari tahun 1984 hingga tahun 2002. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ketimpangan mempunyai pengaruh negatif terhadap elastisitas pertumbuhan kemiskinan
8	Puruwita dkk(2012)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan per	Kemiskinan, Pendidikan, Pendapatan per Kapita, Pengangguran	Ordinary Least Square (OLS)	Hasil penelitian ini pendidikan mempunyai dampak negatif terhadap kemiskinan. Pendapatan per Kapita berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan dan berpengaruh secara signifikan.

		Kapita dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di DKI JAKARTA			
9	Nadhif Alawi (2006)	Pengaruh Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Terhadap Kemiskinan Studi Kasus: Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2002 - 2004	Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah	Analisis Deskriptif	Temuan utama dari penelitian ini adalah pembuktian bahwa ketiga jenis pengeluaran tersebut berpengaruh terhadap ketiga jenis ukuran kemiskinan, yaitu: tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan di Jawa tengah. Lebih jauh lagi, penelitian ini mendukung hipotesa adanya hubungan yang searah antara usaha pertumbuhan ekonomi dan usaha mengurangi kemiskinan, terbukti dan hubungan yang negatif antara tingkat kemiskinan dengan pengeluaran dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
10	Azwar dan Achmat Subekan (2006)	Analisis Determinan Kemiskinan Di Sulawesi Selatan	Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Indeks Kesehatan, Angka Partisipasi Sekolah, Belanja daerah	Data Panel	Hasil empiris membuktikan bahwa seluruh variabel determinan yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi regional, jumlah pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara secara parsial, variabel pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel-variabel lainnya yaitu pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.3 Bagan Kerangka Konseptual

Berangkat dari landasan yang dikemukakan oleh Prof.Dudley Seers dalam Todaro dan Smith (2009:17) tentang indikator pembangunan ekonomi suatu negara. Menurutnya jika ada negara yang mengklaim telah melakukan pembangunan, maka patut dipertanyakan terkait dengan masalah kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan negara tersebut. Untuk itu Indonesia menetapkan salah satu sasaran pembangunan adalah pengentasan kemiskinan dan dijadikan salah satu variabel dalam penelitian ini. Dalam melakukan pembangunan ekonomi pentingnya stabilitas ekonomi makro bagi kelancaran dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, Pemerintah bertekad untuk terus menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi makro. Salah satu arah kerangka ekonomi makro dalam jangka menengah adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mencegah timbulnya fluktuasi yang berlebihan di dalam perekonomian. Stabilitas keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari pembangunan ekonomi, sistem keuangan

berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pembangunan ekonomi. Sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya.

Tiga penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas akan menyebabkan rendahnya pendapatan yang akan diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya (Ragnar Nuske, dalam Kuncoro, 2000:107).

Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Sunusi (2014), Sudarlan (2015), Arius (2012), dan Suryadarma (2015) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat berperan besar dalam pengurangan kemiskinan, meskipun bukan satu-satunya cara untuk mengurangi kemiskinan. Inilah kemudian yang menjadikan beberapa negara termasuk Indonesia menggunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan.

Menurut Psacharopoulos (dalam Purwita dkk, 2012), tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam mengatasi distribusi pendapatan dan kemiskinan. Bahwa pendidikan dapat mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara langsung, dengan cara meningkatkan produktivitas bagi golongan miskin, pendidikan juga dapat memperbaiki kesempatan kerja untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih baik, dan membuka jalur hubungan vertikal bagi anak-anak mereka. Karena secara tidak langsung dengan pendidikan yang tinggi dapat memberikan kemampuan yang lebih tinggi bagi golongan miskin memperoleh bagian mereka dari total pendapatan.

Menurut Dumairy (dalam Sunusi, 2014) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan

biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah tentu saja tidak hanya melakukan pengeluaran, tetapi juga memperoleh penerimaan. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dimasukkan dalam suatu konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda pemerintah sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis, melainkan dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi.

Untuk mengentaskan kemiskinan dan tercapainya kesejahteraan di butuhkan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pendidikan dan pengeluaran pemerintah yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung dalam mengentaskan kemiskinan dan tercapainya kesejahteraan. Dalam melakukan pembangunan ekonomi maka diperlukan kebijakan alternatif yang dapat menekan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan yang sangat lebar dinegara berkembang (Todaro dan Smith, 2009:369).

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara/ kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya harus diuji secara empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

- a. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
- b. Variabel distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
- c. Variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
- d. Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan diuraikan dalam bab tiga ini merupakan metode untuk mengestimasi variabel melalui data yang di peroleh. Metode yang berisi tentang rancangan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, uji statistik dan uji asumsi klasik.

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode explanatory research. Metode ini menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan terikat (Singarimbun dan Sofian,1989:5). Dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pendidikan, dan pengeluaran pemerintah. Dalam penelitian ini menggunakan variabel pengikat yaitu kemiskinan

3.1.2 Unit Analisis Data

Unit analisis penelitian ini untuk mengetahui perkembangan Kemiskinan di Indonesia. Unit Analisis dalam penelitian ini adalah Kemiskinan sebagai variabel terikat, sedangkan variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini terdiri pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pendidikan, dan pengeluaran pemerintah di Indonesia tahun 2012 – 2016.

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada laporan badan pusat statistik (BPS Jawa Timur) khususnya data tahun 2012 hingga tahun 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pendidikan, dan pengeluaran pemerintah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel

yaitu data yang merupakan dari data time series dan cross section. Data time series pada periode tahun 2012 – 2016, sedangkan data cross section adalah 33 Provinsi yang ada di Indonesia.

3.2 Metode Analisis Data

3.2.1 Analisis Data Panel

Menurut Gujarati (2013) Data Panel atau yang bisa disebut Data Longitudinal atau juga bisa disebut Data Mikro Panel merupakan gabungan antara data cross section dan data time series. Data cross section adalah data yang terdiri atas satu atau lebih variabel yang dikumpulkan pada waktu yang sama, sedangkan data time series adalah sebuah kumpulan observasi terhadap nilai – nilai sebuah variabel dari beberapa periode waktu yang berbeda. Metode data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan analisis empirik dengan perilaku data yang lebih dinamis.

Terdapat tiga tehnik pendekatan mendasar yang digunakan dalam menganalisis panel data yaitu (Mirza,2012) :

1. Pendekatan Model Pooled Least Square (Common Effect). Model ini dikenal dengan estimasi Common Effect yaitu tehnik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya mengkombinasikan data time series dan data cross section. Model ini hanya menggabungkan kedua data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan Metode OLS (Ordinary Least Square) karena menggunakan kuadrat kecil biasa. Dalam pendekatan ini hanya mengasumsikan bahwa perilaku data antar ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Pada beberapa penelitian data panel, model ini seringkali tidak digunakan sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yang tidak membedakan perilaku data sehingga memungkinkan terjadinya bias, namun model ini digunakan sebagai pembanding dari kedua pemilihan model lainnya.
2. Pendekatan Model Efek Tetap (Fixed Effect). Pendekatan model ini menggunakan variabel boneka yang dikenal dengan sebuta model efek

tetap atau Least Square Dummy Variabel atau disebut juga Covariance Model. Pada metode ini estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot atau Least Square Dummy Variabel (LSDV) dan dengan pembobot (Cross – Section Weight) atau General Least Square (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit cross – section. Penggunaan model ini tepat untuk melihat perubahan perilaku data dari masing – masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam mengintreprestasi data. Pemilihan model Common Effect dan Fixed Effect dapat dilakukan dengan pengujian Likelihood Test Ratio dengan ketentuan apabila nilai probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat diambil keputusan menggunakan Fixed Effect Model.

3. Pendekatan Model Efek Acak (Random Effect). Model data dengan pendekatan ini yaitu model efek acak yang parameter – parameternya berbeda antar daerah maupun antar waktu yang dimasukkan ke dalam error. Dengan menggunakan model pendekatan ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan menjadi semakin efisien. Keputusan menggunakan model efek tetap maupun efek acak dapat ditentukan dengan menggunakan uji Hausman dengan ketentuan apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat memilih salah satu yang terbaik antara model Fixed Effect dengan Random Effect. Perumusan model penelitian ini menurut Azwar dan Achmat Subekan (2006) dalam menggunakan model sebagai berikut :

$$KMit = \alpha + \beta1 PDRBit + \beta2 PGRit + \beta3 IKit + \beta4 SKLit + \beta5 BDit$$

Keterangan:

KMit	= Kemiskinan
PDRBit	= Pertumbuhan Ekonomi
PGRit	= Pengangguran
IKit	= Indeks Kesehatan
SKLit	= Angka Partisipasi Sekolah

BDit = Belanja Daerah

Berdasarkan model penelitian Azwar dan Achmat Subekan (2006) maka dalam penelitian ini menggunakan model sebagai berikut :

$$KMS_{it} = \alpha + \beta_1 GRO_t + \beta_2 GIN_{it} + \beta_3 EDU_{it} + \beta_4 LOGGOV_{it} + e_{it}$$

Dimana :

Y = Kemiskinan (%)

GRO_{it} = Gross Domestic Product (%)

GIN_{it} = Indeks GINI

EDU_{it} = Tingkat pendidikan (%)

LOGGOV_{it} = Pengeluaran pemerintah (%)

β_0 = Intercept

β_1 = Besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan

β_2 = Besarnya pengaruh Indeks GINI (ketimpangan pendapatan) terhadap kemiskinan

β_3 = Besarnya pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan

β_4 = Besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah

e_{it} = error

3.2.2 Pemilihan Uji Regresi Data Panel

3.2.2.1 Uji Chow

Menurut Safitri(2015) Chow Test merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan Pooled Least Square Model (PLS) atau Fixed Effect Model (FEM) dengan hipotesisnya adalah

H_0 = Pooled Least Square Model (Restricted)

H_1 = Fixed Effect Model (Unrestricted)

Apabila nilai Chow Statistik (F statistik) > $F_{N-1, NT-K}$, maka cukup bukti untuk menolak H_0 , artinya model yang digunakan Fixed effect Model

3.2.2.2 Uji Hausman Test

Menurut Safitri (2015), pengujian yang dapat dilakukan untuk memilih model yang terbaik antara fixed effect model dengan random effect model adalah dengan uji Hausman. Hipotesisnya adalah

H_0 = Random Effect Model (REM)

H_1 = Fixed Effect Model (FEM)

Tolak H_0 apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari Chi Square atau bisa juga dengan menggunakan nilai probabilitas (p-value), yaitu jika p-value lebih kecil dari tingkat kritis α . Ketika hasilnya adalah tolak H_0 , maka model yang digunakan adalah Fixed Effect Model.

3.2.3 Uji Statistik

Uji statistik dilakukan untuk mengetahui besarnya masing-masing koefisien dari variabel-variabel bebas baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap variabel terikat yaitu dengan menggunakan uji secara serentak (Uji-F), uji parsial (Uji-t) dan koefisien determinasi berganda (adjusted R-square).

1. Uji F (Pengujian Secara Bersama – Sama)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan secara bersama – sama terhadap Kemiskinan di J.

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{1 - R^2 / (n - 1)}$$

Dimana :

R^2 = Koefesien Determinasi

k = Jumlah Variabel Bebas

n = Jumlah Sampel

Dalam pengujian ini telah dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- a. $H_0 = b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$, Berarti seluruh variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.
- b. $H_a = b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq 0$, Berarti seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.

Kriteria Pengujian :

- 1) Jika nilai $F_{hitung} \leq$ nilai F_{Tabel} maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- 2) Jika nilai $F_{hitung} >$ nilai F_{Tabel} maka H_0 ditolak dan H_a diterima .

2. Uji t (Secara Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah uji variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

$$t_{\text{hitung}} = \frac{b}{SB}$$

Dimana :

β_1 = Koefisien Regresi

$S\beta_1$ = Standard Error

Dalam pengujian ini telah dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi
 - 1) $H_0 = b_1 = 0$, artinya variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
 - 2) $H_a = b_1 \neq 0$, artinya variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
- b. Distribusi Pendapatan
 - 1) $H_0 = b_2 = 0$, artinya variabel distribusi pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
 - 2) $H_a = b_2 \neq 0$, artinya variabel distribusi pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
- c. Pendidikan
 - 1) $H_0 = b_3 = 0$, artinya variabel pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
 - 2) $H_a = b_3 \neq 0$, artinya variabel pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
- d. Pengeluaran Pemerintah
 - 1) $H_0 = b_3 = 0$, artinya variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
 - 2) $H_a = b_3 \neq 0$, artinya variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap

Kriteria pengambilan keputusan:

- 1) Jika probabilitas t hitung $\leq \alpha$ (0.05), di mana α merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) Jika probabilitas t hitung $> \alpha$ (0.05), di mana α merupakan besarnya kesalahan yang ditolerir di dalam pengambilan keputusan maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
3. Koefisien Determinasi (adjusted R-square)

Adjusted R^2 adalah uji statistik yang melihat seberapa besar total variabel independen yang dapat menjelaskan variabel dependen. Disini adjusted R-square lebih untung digunakan dalam penelitian dikarenakan dalam uji R-square variabel keseluruhan yang diuji.

$$\text{adjusted R-square} = \frac{ESS}{TSS}$$

Dimana :

$$\begin{aligned} \text{adjusted } R^2 &= \text{Koefisien Determinasi} \\ ESS &= \text{Jumlah Kuadrat yang Dijelaskan} \\ TSS &= \text{Jumlah Kuadrat Total} \end{aligned}$$

3.2.4 Uji Asumsi Klasik

Agar tercapai suatu estimasi koefisien regresi yang diperoleh dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (Ordinal Least Square Estimator) merupakan estimasi linier tak bias BLUE (Best Linier Unbiased Estimators) maka dalam uji ini merupakan uji ekonometrika yang meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji normalitas (Wardhono, 2004:56).

a. Uji Multikolinieritas

Menurut Wardhono (2004:56) multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel bebas lainnya. Dengan kata lain adanya gejala multikolinieritas menunjukkan terdapat hubungan sempurna atau beberapa variabel penjelas

(variabel bebas). Multikolinieritas diduga terjadi jika nilai R^2 tinggi dan nilai t semua variabel penjelas tidak signifikan, serta nilai F tinggi.

Menurut Wardhono (2004:57) untuk mendeteksi adanya multikolinieritas salah satunya dapat menggunakan uji Klein, multikolinieritas baru menjadi masalah apabila derajat multikolinieritasnya tinggi dan akan diabaikan jika keadaan multikolinieritasnya rendah dan tidak berbahaya bagi interpretasi hasil regresi. Cara mendeteksi uji Klein ini dapat dilihat dengan derajatnya berdasarkan koefisien determinasi partial (r^2) dari regresi antara variabel bebas metode penelitian. Apabila nilai r^2 lebih besar atau sama dengan nilai R^2 maka dapat disimpulkan tingkat multikolinieritas cukup tinggi.

b. Uji Heterokedastisitas

Terjadi apabila variabel pengganggu mempunyai varian yang tidak konstan atau berubah-ubah. Heteroskedastisitas cenderung menyerang model empiris yang menggunakan data cross section dari pada data time series. Hal ini terjadi karena perilaku data time series fluktuasinya dari waktu ke waktu relatif stabil. Konsekuensinya adanya gejala heteroskedastisitas adalah estimator tidak lagi mempunyai varian yang minimum yang berakibat perhitungan standar error metode OLS tidak bisa dipercaya lagi kebenarannya, uji- t dan uji- F tidak bisa dipercaya lagi untuk uji model regresi (Gujarati, 2013:463).

c. Uji autokolerasi

Istiah uji autokolerasi merupakan korelasi antara seri observasi yang disusun menurut urutan waktu (cross – section), atau korelasi pada dirinya sendiri (Supranto, 2004:82). Uji asumsi autokolerasi juga bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Konsekuensi dari adanya korelasi antara lain adalah (Wardhono, 2004:60) :

- 1) Estiamator OLS tidak efisien dan test signifikan menjadi tidak valid lagi.
- 2) Uji t atau uji F menjadi tidak valid, sehingga kesimpulan menjadi bias.
- 3) Estimator OLS akan sensitif terhadap fluktuasi sampling.

Pengujian disini dapat dilakukan dengan uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM. Uji BG-LM digunakan untuk mengidentifikasi masalah

autokorelasi tidak hanya pada first order tetapi bisa juga digunakan pada order lainnya (Gujarati, 2003).

Kriteria pengujian:

- 1) Apabila nilai probabilitas x^2 hitung \leq nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi ditolak.
- 2) Apabila nilai probabilitas x^2 hitung \geq nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi diterima.

d. Uji Normalitas

Kenormalan dari variabel pengganggu dapat diamati dengan melakukan uji Jarque Berra LM (Gujarati, 1995:143 dalam Wardhono, 2004:61). Variabel pengganggu memiliki distribusi normal, sehingga uji t dan F dapat dilakukan. Namun apabila asumsi normalitas tidak dapat terpenuhi maka inferensi tidak dapat dilakukan dengan uji t dan F, hanya dapat dilakukan dengan konteks asumsi asimtorik. Kenormalan diuji kebenaran atas keadaan normalitas harus dipenuhi dengan hubungannya dan keabsahannya yang dilakukan Uji t dan Uji F.

Kriteria pengujian adalah menghitung nilai Chi Square dari uji ini didasarkan test of swekness dan kurtosis of residual. Untuk melihat apakah terdistribusi normal atau tidak dengan melihat nilai C_s - hitung dan C_s - tabel, apabila C_s – hitung $>$ C_s – tabel maka variabel pengganggu dari model tidak normal dan begitupun sebaliknya (Wardhono, 2004:61).

3.2.5 Definisi Operasional Variabel

Variabel operasional adalah variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan istilah – istilah yang digunakan dalam penelitian ini dan untuk menghindari meluasnya permasalahan atau untuk menghindari terjadinya salah tafsir sehingga di perlukan batasan – batasan masalah sebagai berikut :

- a. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Persentase kemiskinan adalah

- penduduk yang memiliki rata – rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dengan satuan persen (BPS).
- b. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jumlah output yang diproduksi dalam suatu negara pada suatu periode tertentu yang diukur dengan GDP harga konstan dari tahun 2012 - 2016 dengan satuan persen (BPS).
 - c. Distribusi pendapatan dapat dihitung menggunakan Indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran numerik agregat ketimpangan pendapatan yang berkisar dari 0 (kemerataan sempurna) sampai dengan 1 (ketimpangan sempurna). Koefisien Gini diukur secara grafis dengan membagi bidang yang terletak di antara garis pemerataan sempurna dan kurva Lorenz dengan bidang yang terletak di bagian kanan garis pemerataan dalam diagram Lorenz. Semakin tinggi nilai koefisien semakin tinggi pula tignkat ketimpangan distribusi pendapatan, dan begitu juga sebaliknya (Todaro dan Smith, 2009:257)
 - d. Pendidikan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf menurut golongan umur dan daerah tempat tinggal. Pengukuran pendidikan dari tahun 2012 – 2016 dengan satuan persen (BPS).
 - e. Pengeluaran pemerintah diukur dari total belanja pemerintah tahun 2012 – 2016 di 33 provinsi Indonesia dengan satuan millyar (BPS).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian Perrumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan, Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di 33 Provinsi di Indonesia. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan di 33 Provinsi Indonesia. Di tahun 2012 – 2016 pertumbuhan ekonomi di 33 Provinsi di Indonesia mengalami peningkatan di berbagai daerah sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat mengurangi kemiskinan.
2. Distribusi Pendapatan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan di 33 Provinsi Indonesia. Di tahun 2012 – 2016 distribusi pendapatan di berbagai daerah masih memiliki nilai yang terpaut cukup jauh di berbagai daerah akan tetapi kebijakan program pemerintah dapat membantu meningkatkan perekonomian msasyarakat sekitar dengan memudahkan fasilitas perizinan UMKM, dan mendapatkan modal dengan bunga rendah. Hal ini dapat mengentaskan masalah kemiskinan.
3. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan di 33 Provinsi Indonesia. Dalam Variabel ini pendidikan memiliki arti dapat membantu mengentaskan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan jika tingkat pendidikan penduduk di negara berkembang meningkat satu-satuan maka dapat mengurangi kemiskinan sebesar satu-satuan di negara berkembang tersebut.
4. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan di 33 Provinsi Indonesia. Hal ini menunjukkan jika pengeluaran pmerintah di negara mengalami peningkatan satu-satuan maka dapat mengurangi kemiskinan di negara tersebut sebesar satu-satuan.

5.2 Saran

Saran yang di diperoleh dari hasil penelitian variabel Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan, Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di 33 Provinsi Indonesia sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan cara memaksimalkan perekonomian rumah tangga di setiap daerah. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan menciptakan satu rumah tangga memiliki satu usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Pemerintah dapat membantu masyarakat dengan memberikan pelatihan agar dapat menciptakan lapangan usahanya sehingga rumah tangga tersebut dapat menambah penghasilan bagi dirinya dan sekitarnya. Mendorong UMKM di setiap daerah dengan mengadakan pameran secara berkala. Mendorong investasi di daerah untuk menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, menstabilkan bunga kredit usaha rakyat untuk jangka panjang dalam mendapatkan akses modal yang tidak membebani berlebih kepada pelaku usaha.
2. Dalam pemerataan distribusi pendapatan di berbagai daerah sebaiknya dilakukan dengan pemerataan kebutuhan pokok di setiap daerah. Dengan pemerataan kebutuhan pokok di setiap daerah diharapkan tidak terjadinya kembali ketimpangan pendapatan di daerah. Mempermudah mobilitas atau akses menuju daerah tersebut juga sangat diperlukan guna menekan angka kemiskinan di daerah-daerah yang masih terpencil. Memperluas akses darat dan laut sangat diperlukan untuk menuju ke daerah-daerah terpencil.
3. Variabel Pendidikan merupakan salah satu variabel yang dapat menekan angka kemiskinan di suatu negara. Berkembangnya pendidikan diharapkan dapat mengubah pendapatan seseorang. Memberikan fasilitas pendidikan dengan mengirimkan berbagai tenaga kerja yang terpusat ke tempat terpencil guna pemerataan pendidikan di setiap daerah. Berkeja sama dengan investor-investor juga dapat membantu membantu

mendirikan-mendirikan sekolah di pelosok-pelosok. Selain pendidikan juga disertai memberikan lapangan pekerjaan yang luas juga dibutuhkan dalam pengentasan kemiskinan. Hal lain yang dapat dilakukan juga dengan cara mengirim beberapa anak yang di pedalaman dengan memberi pendidikan fasilitas gratis pendidikan di wilayah yang lebih maju.

4. Pengeluaran Pemerintah yang semakin meningkat diharapkan dapat mengurangi permasalahan kemiskinan yang ada. Harapannya pengeluaran tersebut dapat digunakan secara tepat sasaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan memberikan anggaran yang lebih besar di daerah-daerah terpencil tidak hanya di daerah besar saja. Hal yang dapat diwujudkan dalam zaman saat ini yaitu dengan membuat anggaran pemerintah berdasarkan potensi daerah yang dapat dimaksimalkan. Dengan peninjauan dan lebih selektif dalam mengeluarkan dana anggaran sangat perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, 2006, Mereduksi kemiskinan; sebuah proposal baru untuk Indonesia, Nala Cipta Litera, 2009
- Alawi, Nadhif. 2006. Pengaruh Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Terhadap Kemiskinan Studi Kasus: Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2002-2004
- Aristina, 2017. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Arsyad, Lincoln. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- ASEAN Stats. 2016. *Asean Statistical Leaflet Selected Key Indicators*. http://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2016/10/ASEAN_Stats_Leaflet2016_web.pdf
- Asian Development Bank. 2017. *Basic Statistic Economic Research and Regional Cooperation Departement*. <https://www.adb.org/publications/basic-statistics-2017>
- Astuti, Wuku. 2015. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011)*. <http://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/61/68>
- BPS Pusat, 2017. Statistik Indonesia Tahun 2010. Jakarta Pusat
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2017. Kemiskinan Indonesia 20012 – 2016
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2017. Distribusi Pendapatan Indonesia 2012 – 2016
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2017. Pertumbuhan Ekonomi 2012 – 2016
- Criswardani Suryawati, 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. <https://journal.ugm.ac.id/jmpk/article/download/2927/2646>
- Dao, Minh Quang. 2007. *Human capital, poverty, and income distribution in developing countries*. Canada: Carleton University Journal

- Dyah, 2015. Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Tengah. Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
- Fan, Shenggen, Xiaobo Zhang, and Neetha Rao. 2004. *Public Expenditure, Growth, And Poverty Reduction In Rural Uganda*. DSGD Discussion Paper No. 4. Washington DC: International Food Policy Research Institute
- Gujarati, D.N dan Porter, D.C 2013 *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Edisi ke Lima Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Jonaidi, Arius. 2012. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia*. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekonomi/article/viewFile/742/611>
- Mariah, Sunda, 2016 *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Pendidikan , dan Kesehatan Terhadap Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember*, dalam Skripsi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
- Mirza, S.D. 2012 *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2009*, Jurnal Analisis Pembangunan Manusia Fakultas Ekonomi Universitas Negri Semarang
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2015. *Survei Ekonomi OECD Indonesia*. <https://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf>
- Prastyo, 2010, *Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*, dalam Skripsi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Puruwita, Dita, Darma R.S, dan Munawaroh. 2012. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Per Kapita Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di DKI Jakarta*. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/econosains/article/view/628>
- Putra, 2011. Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000 – 2007. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Raswita, N.P Mahesa Eka dan Utama, Made Suyana. 2013. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Gianyar*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/4290>
- Ratih,I.A, Agus, L, Siswoyo, H.S. 2015. *Analisis Kausalitas Kesenjangan Pendapatan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang*, dalam Jurnal Imiah Mahasiswa 2015.

<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/68252/RATIH%20INGE%20ARYUNAH.pdf?sequence=1>

- Safitri. 2015, *Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Analisis Data Provinsi di Indonesia 2010 – 2013*, dalam skripsi. Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
- Sari, R.D. 2006. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Sektor–Sektor Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan Di Kabupaten Bogor*. Dalam Repository Institut Pertanian Bogor.
- Singarimbun, dan Effedndi Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Siregar,Wahyuniarti. 2008, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Dalam kajian ekonomi & Lingkungan
- Sudarlan. 2015. *Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Dan Kemiskinan Di Indonesia*.<http://karyailmiah.polnes.ac.id/images/Download-PDF/Dr.%20Sudarlan%20ST,%20MT/PertumbuhanKetimpangandanKemiskinan.pdf>
- Sunusi, Dewi. 2014. *Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara Tahun 2001 – 2010*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/4732>
- Supranto, J. 2004. *Ekonometri*. Buku Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suryadarma, Daniel, Rima Prama A, Asep Suryahadi, dan Sudarno Sumarto. 2005. *A Reassessment Of Inequality And Its Role In Poverty Reduction In Indonesia*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=856764
- Todaro,M.P.dan dan S.C.Smith. 2009. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke Sebelas Jilid I. Jakarta:Erlangga.
- Wahyudi, Dicky, dan Rejekiningsih W.T. 2013. *Analisis Kemiskinan Di Jawa Tengah*. dalam diponegoro journal of economics volume 2, nomor 1
- Wardhono, A. 2004 *Mengenal Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama.Jember:Fakultas Ekonomi Universitas JemberWorld Bank, 2006, Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia
- Widodo, 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

World Economic Outlook IMF. International Monetary Fund, 2014

Wulandari, 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Provinsi Indonesia Tahun 2008-2012. Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Kemiskinan di 33 Provinsi Indonesia Tahun 2012 - 2016

NO	Provinsi	KEMISKINAN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	18,58	17,72	16,98	17,11	16,73
2	Sumatera Utara	10,41	10,39	9,85	10,79	10,35
3	Sumatera Barat	8,00	7,56	6,89	6,71	7,09
4	Riau	8,05	8,42	7,99	8,82	7,98
5	Jambi	8,29	8,41	8,39	9,12	8,41
6	Sumatera Selatan	13,48	14,06	13,62	13,77	13,54
7	Bengkulu	17,52	17,75	17,09	17,16	17,32
8	Lampung	15,65	14,39	14,21	13,53	14,29
9	Kep. Bangka Belitung	5,36	5,25	4,97	4,83	5,22
10	Kep. Riau	6,83	6,35	6,40	5,78	5,98
11	DKI Jakarta	3,70	3,72	4,09	3,61	3,75
12	Jawa Barat	9,88	9,61	9,18	9,57	8,95
13	Jawa Tengah	14,98	14,44	13,58	13,32	13,27
14	DI Yogyakarta	15,88	15,03	14,55	13,16	13,34
15	Jawa Timur	13,08	12,73	12,28	12,28	12,05
16	Banten	5,71	5,89	5,51	5,75	5,42
17	Bali	3,95	4,49	4,76	5,25	4,25
18	Nusa Tenggara Barat	18,02	17,25	17,05	16,54	16,48
19	Nusa Tenggara Timur	20,41	20,24	19,60	22,58	22,19
20	Kalimantan Barat	7,97	8,74	8,07	8,44	7,87
21	Kalimantan Tengah	6,19	6,23	6,07	5,91	5,66
22	Kalimantan Selatan	5,02	4,76	4,81	4,72	4,85
23	Kalimantan Timur	6,38	6,38	6,31	6,10	6,11
24	Sulawesi Utara	7,63	8,50	8,26	8,98	8,34
25	Sulawesi Tengah	14,94	14,32	13,61	14,07	14,45
26	Sulawesi Selatan	9,82	10,32	9,54	10,12	9,40
27	Sulawesi Tenggara	13,06	13,73	12,77	13,74	12,88
28	Gorontalo	17,21	18,00	17,41	18,16	17,72
29	Sulawesi Barat	13,00	12,23	12,05	11,90	11,74
30	Maluku	20,76	19,27	18,44	19,36	19,18
31	Maluku Utara	8,05	7,64	7,41	6,22	6,33
32	Papua Barat	27,04	27,14	26,26	25,73	25,43
33	Papua	30,66	31,52	27,80	28,40	28,54
	INDONESIA	11,96	11,37	10,96	11,13	10,86

Lampiran 2. Data Pertumbuhan Ekonomi di 33 Provinsi Indonesia Tahun 2012 – 2016

No.	Provinsi	PDB				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	3,85	2,61	1,55	-0,73	3,31
2	Sumatera Utara	6,45	6,07	5,23	5,10	5,18
3	Sumatera Barat	6,31	6,08	5,88	5,52	5,26
4	Riau	3,76	7,48	2,71	0,22	2,23
5	Jambi	7,03	6,84	7,36	4,20	4,37
6	Sumatera Selatan	6,83	5,31	4,79	4,42	5,03
7	Bengkulu	6,83	6,07	5,48	5,13	5,30
8	Lampung	6,44	5,77	5,08	5,13	5,15
9	Kep. Bangka Belitung	5,50	5,20	4,67	4,08	4,11
10	Kep. Riau	7,63	7,21	6,60	6,01	5,03
11	DKI Jakarta	6,53	6,07	5,91	6,07	6,53
12	Jawa Barat	6,50	6,33	5,09	5,04	5,67
13	Jawa Tengah	5,34	5,11	5,27	5,47	5,28
14	DI Yogyakarta	5,37	5,47	5,17	4,95	5,05
15	Jawa Timur	6,64	6,08	5,86	5,44	5,55
16	Banten	6,83	6,67	5,51	5,40	5,26
17	Bali	6,96	6,69	6,73	6,03	6,24
18	Nusa Tenggara Barat	-1,54	5,16	5,17	21,77	5,82
19	Nusa Tenggara Timur	5,46	5,41	5,05	5,03	5,18
20	Kalimantan Barat	5,91	6,05	5,03	4,86	5,22
21	Kalimantan Tengah	6,87	7,37	6,21	7,01	6,36
22	Kalimantan Selatan	5,97	5,33	4,84	3,83	4,38
23	Kalimantan Timur	5,48	2,76	1,71	-1,21	-0,38
24	Sulawesi Utara	6,86	6,38	6,31	6,12	6,17
25	Sulawesi Tengah	9,53	9,59	5,07	15,52	9,98
26	Sulawesi Selatan	8,87	7,62	7,54	7,17	7,41
27	Sulawesi Tenggara	11,65	7,50	6,26	6,88	6,51
28	Gorontalo	7,91	7,67	7,27	6,22	6,52
29	Sulawesi Barat	9,25	6,93	8,86	7,39	6,03
30	Maluku	7,16	5,24	6,64	5,48	5,76
31	Maluku Utara	6,98	6,36	5,49	6,10	5,77
32	Papua Barat	3,63	7,36	5,38	4,15	4,52
33	Papua	1,72	8,55	3,65	7,47	9,21
	INDONESIA	6,16	5,71	5,2	4,98	5,02

Lampiran 3. Data Indeks Gini di 33 Provinsi Indonesia Tahun 2012 – 2016

No.	Provinsi	PDB				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	0,32	0,34	0,32	34,00	0,33
2	Sumatera Utara	0,33	0,35	0,32	0,33	0,32
3	Sumatera Barat	0,36	0,36	0,33	0,32	0,33
4	Riau	0,40	0,37	0,35	0,37	0,35
5	Jambi	0,34	0,35	0,33	0,34	0,35
6	Sumatera Selatan	0,40	0,38	0,40	0,33	0,35
7	Bengkulu	0,35	0,39	0,36	0,37	0,36
8	Lampung	0,35	0,39	0,36	0,37	0,36
9	Kep. Bangka Belitung	0,29	0,31	0,31	0,28	0,28
10	Kep. Riau	0,35	0,36	0,40	0,34	0,35
11	DKI Jakarta	0,42	0,43	0,43	0,42	0,41
12	Jawa Barat	0,41	0,41	0,41	0,43	0,41
13	Jawa Tengah	0,38	0,39	0,38	0,38	0,37
14	DI Yogyakarta	0,43	0,44	0,42	0,42	0,42
15	Jawa Timur	0,36	0,36	0,37	0,40	0,40
16	Banten	0,39	0,40	0,39	0,39	0,39
17	Bali	0,43	0,40	0,41	0,40	0,37
18	Nusa Tenggara Barat	0,35	0,36	0,38	0,36	0,36
19	Nusa Tenggara Timur	0,36	0,35	0,36	0,35	0,34
20	Kalimantan Barat	0,38	0,40	0,39	0,33	0,34
21	Kalimantan Tengah	0,33	0,35	0,35	0,30	0,33
22	Kalimantan Selatan	0,38	0,36	0,36	0,33	0,33
23	Kalimantan Timur	0,36	0,37	0,35	0,32	0,32
24	Sulawesi Utara	0,43	0,42	0,42	0,37	0,39
25	Sulawesi Tengah	0,40	0,41	0,37	0,37	0,36
26	Sulawesi Selatan	0,41	0,43	0,42	0,40	0,43
27	Sulawesi Tenggara	0,40	0,43	0,41	0,38	0,40
28	Gorontalo	0,44	0,44	0,41	0,40	0,42
29	Sulawesi Barat	0,31	0,35	0,35	0,36	0,36
30	Maluku	0,38	0,37	0,35	0,34	0,35
31	Maluku Utara	0,34	0,32	0,32	0,29	0,29
32	Papua Barat	0,43	0,43	0,44	0,43	0,37
33	Papua	0,44	0,44	0,41	0,39	0,39
	INDONESIA	0,41	0,41	0,41	0,4	0,40

Lampiran 4. Data Pendidikan di 33 Provinsi Indonesia Tahun 2012 – 2016

No.	Provinsi	PDB				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	96,11	96,66	98,25	97,63	97,74
2	Sumatera Utara	97,35	98,57	98,57	98,68	98,88
3	Sumatera Barat	96,67	98,44	98,44	98,56	98,81
4	Riau	97,79	98,75	98,75	98,87	99,07
5	Jambi	95,57	97,94	97,94	97,84	98,01
6	Sumatera Selatan	96,60	98,14	98,14	98,22	98,46
7	Bengkulu	95,69	96,48	97,52	97,63	97,75
8	Lampung	95,13	95,81	97,46	96,67	96,78
9	Kep. Bangka Belitung	95,88	96,41	97,60	97,63	97,66
10	Kep. Riau	97,80	97,91	98,83	98,79	98,84
11	DKI Jakarta	99,07	99,14	99,54	99,59	99,64
12	Jawa Barat	96,18	96,70	97,96	98,01	98,22
13	Jawa Tengah	90,45	91,27	94,45	93,12	93,30
14	DI Yogyakarta	92,20	92,82	96,87	94,50	94,59
15	Jawa Timur	89,28	90,14	93,18	91,47	91,59
16	Banten	96,51	96,64	97,90	97,37	97,55
17	Bali	90,17	90,84	93,54	92,77	92,82
18	Nusa Tenggara Barat	83,68	84,67	88,11	86,97	87,06
19	Nusa Tenggara Timur	88,73	90,36	92,80	91,45	91,52
20	Kalimantan Barat	91,13	91,34	93,47	92,35	92,39
21	Kalimantan Tengah	97,48	97,93	98,82	98,88	98,97
22	Kalimantan Selatan	96,43	97,04	98,19	98,21	98,28
23	Kalimantan Timur	97,55	97,51	98,59	98,69	98,82
24	Sulawesi Utara	98,85	99,13	99,60	99,63	99,79
25	Sulawesi Tengah	94,95	95,95	97,08	97,34	97,51
26	Sulawesi Selatan	88,73	90,16	92,81	91,29	91,52
27	Sulawesi Tenggara	91,49	92,61	94,03	94,10	94,25
28	Gorontalo	95,22	96,83	97,90	98,24	98,44
29	Sulawesi Barat	88,79	90,79	93,86	92,64	92,75
30	Maluku	97,08	97,37	98,77	98,85	98,94
31	Maluku Utara	96,43	97,37	98,36	98,49	98,67
32	Papua Barat	94,74	95,59	96,75	96,88	97,05
33	Papua	65,59	67,31	70,92	70,80	71,02
	INDONESIA	92,81	93,92	95,88	95,22	95,38

Lampiran 5. Data Pengeluaran Pemerintah di 33 Provinsi Indonesia Tahun 2012 – 2016

NO	Provinsi	Pengeluaran Pemerintah(Total Belanja)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	Rp 14.173.567.754	Rp 12.640.525.642	Rp 13.005.648.412	Rp 12.611.106.738	Rp 12.653.240.528
2	Sumatera Utara	Rp 26.230.904.908	Rp 7.412.094.314	Rp 7.823.455.215	Rp 8.495.656.859	Rp 10.976.894.771
3	Sumatera Barat	Rp 13.550.926.320	Rp 3.424.590.626	Rp 3.876.114.722	Rp 4.326.353.951	Rp 4.876.171.537
4	Riau	Rp 25.427.002.061	Rp 8.972.958.920	Rp 9.583.496.799	Rp 10.892.856.093	Rp 10.075.132.950
5	Jambi	Rp 9.811.595.406	Rp 3.577.072.145	Rp 3.679.159.260	Rp 3.604.245.243	Rp 3.381.884.802
6	Sumatera Selatan	Rp 19.176.768.778	Rp 5.989.474.254	Rp 6.247.547.255	Rp 6.030.394.185	Rp 6.627.641.543
7	Bengkulu	Rp 5.442.675.892	Rp 1.937.725.958	Rp 2.196.415.303	Rp 2.436.203.581	Rp 2.491.650.415
8	Lampung	Rp 13.013.023.505	Rp 3.925.661.229	Rp 4.567.673.497	Rp 4.898.783.191	Rp 5.691.234.106
9	Kep. Bangka Belitung	Rp 4.864.777.225	Rp 1.814.133.507	Rp 1.921.560.499	Rp 2.212.652.280	Rp 2.284.560.318
10	Kep. Riau	Rp 8.140.407.314	Rp 3.358.007.164	Rp 3.457.709.845	Rp 2.649.778.419	Rp 2.852.614.783
11	DKI Jakarta	Rp 41.854.732.064	Rp 48.981.265.543	Rp 51.418.295.337	Rp 53.419.020.077	Rp 59.392.458.271
12	Jawa Barat	Rp 52.654.093.392	Rp 22.172.242.154	Rp 25.897.424.862	Rp 28.561.852.475	Rp 31.344.462.321
13	Jawa Tengah	Rp 47.158.522.419	Rp 14.649.375.799	Rp 16.846.898.289	Rp 18.517.590.787	Rp 20.050.497.701
14	DI Yogyakarta	Rp 6.529.560.492	Rp 2.986.257.423	Rp 3.529.399.058	Rp 3.911.107.930	Rp 4.270.072.673
15	Jawa Timur	Rp 55.845.695.771	Rp 19.126.277.688	Rp 22.619.271.001	Rp 24.678.649.609	Rp 26.527.236.416
16	Banten	Rp 14.509.292.042	Rp 6.681.044.016	Rp 8.138.237.775	Rp 9.236.214.977	Rp 9.786.470.314
17	Bali	Rp 11.571.194.116	Rp 5.008.580.378	Rp 5.617.388.328	Rp 5.873.708.294	Rp 5.923.695.124
18	Nusa Tenggara Barat	Rp 8.137.795.158	Rp 2.407.728.480	Rp 2.803.255.700	Rp 3.647.333.467	Rp 4.148.659.604
19	Nusa Tenggara Timur	Rp 12.194.433.103	Rp 2.639.015.355	Rp 3.022.693.421	Rp 3.570.228.738	Rp 4.040.760.869
20	Kalimantan Barat	Rp 11.440.986.782	Rp 3.484.572.426	Rp 3.847.514.851	Rp 4.207.747.653	Rp 4.503.517.507
21	Kalimantan Tengah	Rp 10.998.387.407	Rp 3.368.430.455	Rp 3.516.414.453	Rp 3.546.928.958	Rp 3.587.854.404
22	Kalimantan Selatan	Rp 12.899.337.143	Rp 5.554.735.855	Rp 5.656.559.719	Rp 5.500.274.371	Rp 5.600.689.225
23	Kalimantan Timur	Rp 37.509.196.600	Rp 14.830.601.027	Rp 12.336.184.311	Rp 9.376.312.818	Rp 8.212.408.939
24	Sulawesi Utara	Rp 8.004.208.654	Rp 2.314.997.122	Rp 2.570.193.127	Rp 2.818.667.730	Rp 2.985.770.053
25	Sulawesi Tengah	Rp 7.783.438.617	Rp 2.280.723.891	Rp 2.588.136.162	Rp 3.037.417.355	Rp 3.253.129.592
26	Sulawesi Selatan	Rp 18.513.978.056	Rp 5.017.395.623	Rp 5.842.842.657	Rp 6.415.560.016	Rp 7.292.544.165
27	Sulawesi Tenggara	Rp 7.713.526.545	Rp 2.176.239.551	Rp 2.520.563.775	Rp 2.886.689.888	Rp 3.260.316.797
28	Gorontalo	Rp 3.126.318.337	Rp 1.153.658.640	Rp 1.301.492.854	Rp 1.476.327.029	Rp 1.652.703.595
29	Sulawesi Barat	Rp 3.006.980.803	Rp 1.175.239.866	Rp 1.369.496.547	Rp 1.473.749.820	Rp 1.814.445.266
30	Mahuku	Rp 5.942.840.588	Rp 1.694.902.822	Rp 1.912.549.625	Rp 2.304.536.102	Rp 2.831.652.375
31	Mahuku Utara	Rp 4.663.826.350	Rp 1.441.124.267	Rp 1.532.719.259	Rp 1.856.130.531	Rp 2.061.128.353
32	Papua Barat	Rp 8.178.665.513	Rp 6.010.272.072	Rp 7.096.756.998	Rp 7.506.270.572	Rp 7.257.003.264
33	Papua	Rp 23.178.365.524	Rp 9.129.555.212	Rp 11.543.021.814	Rp 12.986.631.901	Rp 13.071.335.657

Lampiran 6. Common Effect di 33 Provinsi Indonesia

Dependent Variable: KMS

Method: Panel Least Squares

Date: 05/15/18 Time: 21:10

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	56.49634	9.388386	6.017685	0.0000
GDP	-0.610440	0.335420	-1.819925	0.0706
GINI	25.35236	11.24172	2.255203	0.0255
PNDK	-0.548801	0.078162	-7.021331	0.0000
G	0.280684	0.266331	1.053895	0.2935
R-squared	0.331674	Mean dependent var		11.94200
Adjusted R-squared	0.314965	S.D. dependent var		6.228912
S.E. of regression	5.155472	Akaike info criterion		6.147829
Sum squared resid	4252.623	Schwarz criterion		6.241948
Log likelihood	-502.1959	Hannan-Quinn criter.		6.186035
F-statistic	19.85099	Durbin-Watson stat		0.087280
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 7. Fix Effect di 33 Provinsi Indonesia

Dependent Variable: KMS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/15/18 Time: 21:10
 Sample: 2012 2016
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.18675	3.557851	7.922408	0.0000
GDP	0.062778	0.043610	1.439539	0.1524
GINI	2.235814	2.669124	0.837658	0.4038
PNDK	-0.180154	0.033776	-5.333706	0.0000
G	-0.052540	0.029866	-1.759198	0.0809

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.993824	Mean dependent var	11.94200
Adjusted R-squared	0.992087	S.D. dependent var	6.228912
S.E. of regression	0.554077	Akaike info criterion	1.851544
Sum squared resid	39.29617	Schwarz criterion	2.548028
Log likelihood	-115.7523	Hannan-Quinn criter.	2.134271
F-statistic	572.1832	Durbin-Watson stat	1.815508
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 8. Random Effect di 33 Provinsi Indonesia

Dependent Variable: KMS

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 05/15/18 Time: 21:10

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	29.88477	3.598763	8.304178	0.0000
GDP	0.057850	0.043567	1.327832	0.1861
GINI	2.379142	2.655822	0.895821	0.3717
PNDK	-0.198479	0.033075	-6.000831	0.0000
G	-0.049389	0.029851	-1.654527	0.1000

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	5.005571	0.9879
Idiosyncratic random	0.554077	0.0121

Weighted Statistics

R-squared	0.212435	Mean dependent var	0.590442
Adjusted R-squared	0.192746	S.D. dependent var	0.636146
S.E. of regression	0.571560	Sum squared resid	52.26902
F-statistic	10.78947	Durbin-Watson stat	1.373376
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.166306	Mean dependent var	11.94200
Sum squared resid	5304.872	Durbin-Watson stat	0.013532

Lampiran 9. Like Hood Test di 33 Provinsi Indonesia

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	428.879130	(32,128)	0.0000
Cross-section Chi-square	772.887090	32	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: KMS

Method: Panel Least Squares

Date: 05/15/18 Time: 21:11

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	56.49634	9.388386	6.017685	0.0000
GDP	-0.610440	0.335420	-1.819925	0.0706
GINI	25.35236	11.24172	2.255203	0.0255
PNDK	-0.548801	0.078162	-7.021331	0.0000
G	0.280684	0.266331	1.053895	0.2935
R-squared	0.331674	Mean dependent var		11.94200
Adjusted R-squared	0.314965	S.D. dependent var		6.228912
S.E. of regression	5.155472	Akaike info criterion		6.147829
Sum squared resid	4252.623	Schwarz criterion		6.241948
Log likelihood	-502.1959	Hannan-Quinn criter.		6.186035
F-statistic	19.85099	Durbin-Watson stat		0.087280
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 10. Hausmant test di 33 Provinsi Indonesia

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.256664	4	0.0065

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
GDP	0.062778	0.057850	0.000004	0.0103
GINI	2.235814	2.379142	0.070833	0.5902
PNDK	-0.180154	-0.198479	0.000047	0.0074
G	-0.052540	-0.049389	0.000001	0.0010

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: KMS

Method: Panel Least Squares

Date: 05/15/18 Time: 21:12

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 165

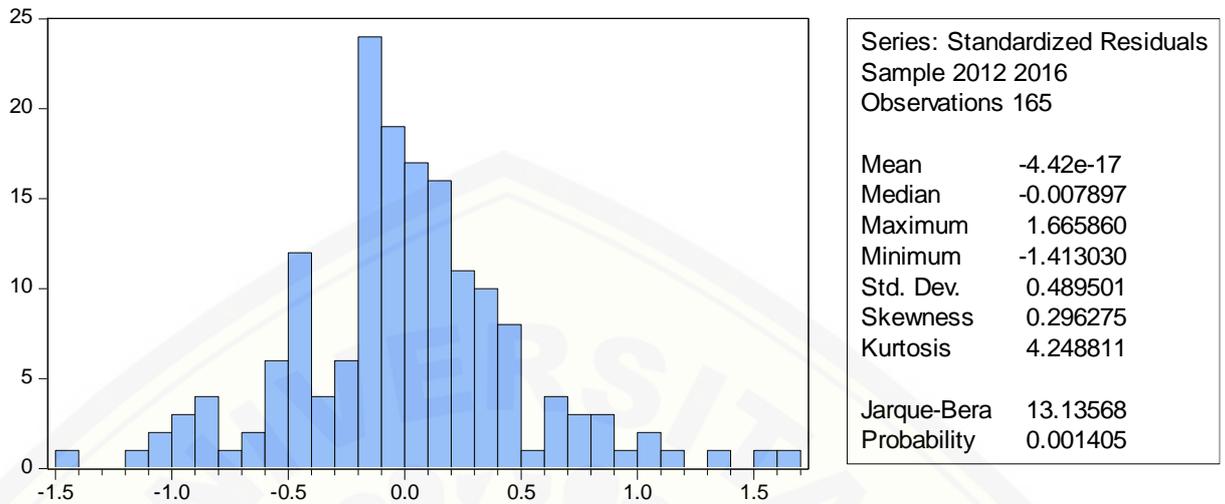
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.18675	3.557851	7.922408	0.0000
GDP	0.062778	0.043610	1.439539	0.1524
GINI	2.235814	2.669124	0.837658	0.4038
PNDK	-0.180154	0.033776	-5.333706	0.0000
G	-0.052540	0.029866	-1.759198	0.0809

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.993824	Mean dependent var	11.94200
Adjusted R-squared	0.992087	S.D. dependent var	6.228912
S.E. of regression	0.554077	Akaike info criterion	1.851544
Sum squared resid	39.29617	Schwarz criterion	2.548028
Log likelihood	-115.7523	Hannan-Quinn criter.	2.134271
F-statistic	572.1832	Durbin-Watson stat	1.815508
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 11. Uji Normalitas di 33 Provinsi Indonesia



Lampiran 12. Uji Multikolinieritas di 33 Provinsi Indonesia

	GDP	GINI	PNDK	G
GDP	1.000000	0.272390	-0.105933	0.747639
GINI	0.272390	1.000000	-0.262243	0.235341
PNDK	-0.105933	-0.262243	1.000000	-0.291163
G	0.747639	0.235341	-0.291163	1.000000

Lampiran 13. Uji Heterokedastisitas di 33 Provinsi Indonesia

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/15/18 Time: 21:15
 Sample: 2012 2016
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.738809	1.753251	0.991763	0.3232
GDP	0.019631	0.021490	0.913500	0.3627
GINI	-0.219237	1.315300	-0.166682	0.8679
PNDK	-0.013907	0.016644	-0.835544	0.4050
G	-0.015828	0.014717	-1.075452	0.2842

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.487998	Mean dependent var	0.353841
Adjusted R-squared	0.343997	S.D. dependent var	0.337111
S.E. of regression	0.273040	Akaike info criterion	0.436173
Sum squared resid	9.542511	Schwarz criterion	1.132658
Log likelihood	1.015717	Hannan-Quinn criter.	0.718901
F-statistic	3.388857	Durbin-Watson stat	2.420372
Prob(F-statistic)	0.000000		